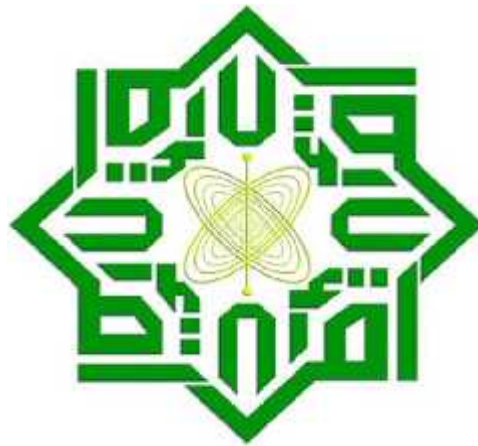


## **S K R I P S I**

### **IMPLEMENTASI USAHA SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA REMPAK KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK**

Diajukan Untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Dalam Ilmu Administrasi Negara



**HAMIM MUNJAHIDI**  
**10975008207**

**PROGRAM S-1**  
**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2013**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun skripsi yang mengambil judul **“IMPLEMENTASI USAHA SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA REMPAK KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasah pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis; Bapak Nasirun (Alm) dan Ibu Romlah, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mudah-mudahan perjuangan bapak dan ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Afrizal, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Rusdi S.Sos selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Nurlasera, S. Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Almasri, M.Si dan Ibu, Sri Haryani S.Ag, Selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Penguji, serta Bapak Mashuri, MA dan Ibu Ihkwani Ratna SE, M.Si selaku Penguji I dan Penguji II pada ujian Munaqasah skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Anwar selaku Kepala Desa Rempak, dan Bapak Asrol selaku Manajer BUMDes, kepada seluruh Pengelola BUMDes dan Aparatur Pemerintah Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, bantuannya tidak akan penulis lupakan.
8. Buat keluarga Mbak Winarti, Mbak Hulatul Lailiah, S.Pd. dan Mas Sofwan Jaidi, Mas Hamidin A.md. terima kasih atas supportnya selama ini. Juga buat keponakanku; Wildan ahyar, Ulil Izza, Husna Zakia, Bintang Muhlis Budiman doa Paman selalu buat kalian semua semoga menjadi anak yang berguna bagi

Bangsa dan Negara. Juga buat adik-adikku; Khairu Anwar, mudah-mudahan kelak kita menjadi anak yang bisa dibanggakan orang tua, Amin.

9. Buat teman-teman seperjuangan penulis, terutama Lokal D angkatan 2009 Jurusan Adm. Negara; Bustamin, S.Ap, Ripa'i, S.Ap, Rendra Rico Adi Saputra, S.Ap, Rony Jaya, S.Ap, Uji Kartono, S.Ap, Susi Astuti Erda Dewi, S.Ap, Rika Karmila, S.Ap Widia Ulfa, Nurul Rahayu, yang banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta buat semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, *you're all my best friend*.

Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Pekanbaru, 25 Januari 2013**  
**Penulis**

**Hamim Munjahidi**  
**10975008207**

### **ABSTRAK**

## **IMPLEMENTASI USAHA SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA REMPAK KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK**

**OLEH: HAMIM MUNJAHIDI**

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh. Untuk mengetahui implementasi BUMDes tersebut, ada (Empat) indikator yang menjadi ukuran yaitu: ketentuan dan prosedur peminjaman, mekanisme pencairan dan pengambilan dana, agunan dan suku bunga, dan sanksi-sanksi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner, wawancara dan observasi. Kemudian teknik analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu pemanfaat usaha simpan pinjam sebanyak 70 orang dengan menggunakan teknik sensus dan pengurus BUMDes dengan menggunakan teknik wawancara. Berdasarkan hasil angket penelitian implementansi tersebut masih dikategorikan Cukup Sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Rempak Maju Jaya.*

*Kata Kunci: Ketentuan, prosedur, mekanisme, pengambilan, agunan, suku bunga, sanksi-sanksi.*

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 ujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Kebijakan politik .....	14
2.2 Implementasi Kebijakan.....	19
2.3 Pemberdayaan masyarakat .....	22
2.4 Usaha Ekonomi Simpan Pinjam.....	27
2.5 Badan Usaha Milik Desa .....	27
2.6 Penelitian Terdahulu.....	32
2.7 Defenisi Konsep .....	34
2.8 Konsep Operasional .....	35
2.9 Teknik Pengukuran.....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian .....	40
3.3.1. Populasi.....	40
3.3.2. Sampel .....	40
3.4 Sabjek dan Objek Penelitian.....	41
3.4.1 Sabjek Penelitian .....	41
3.4.2 Objek penelitian.....	41

3.5 Sumber Data .....	42
3.5.1 Data primer .....	42
3.5.2 Data Sekunder .....	42
3.6 Teknik pengumpulan Data .....	43
3.7 Analisa Data .....	44
 <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Keadaan Geografis Desa Rempak .....	46
4.2 Penduduk .....	47
4.3 Agama Penduduk .....	48
4.4 Pendidikan .....	50
4.5 Kesehatan .....	51
4.6 Gambaran Umum Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa rempak .....	51
 <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Identitas Responden .....	55
5.1.1 Keadaan Responden Berdasarkan Umur .....	55
5.1.2 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	56
5.1.3 Keadaan Responden Berdasarkan Suku .....	57
5.1.4 Keadaan Responden Berdasarkan pendidikan .....	58
5.1.5 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	60
5.2 Analisa indikator Variabel Penelitian .....	61
5.2.1 Ketentuan dan Prosedur Peminjaman .....	61
5.2.2 Mekanisme pencairan dan pengembalian .....	81
5.2.3 Agunan dan Suku Bunga .....	90
5.2.4 Sanksi-Sanksi .....	101
5.3 Faktor-faktor Penghambat Implementasi Usaha Simpan Pinjam BUMDes Di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh .....	114
 <b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan .....	116
6.2 Saran .....	118

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Desa di kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.....	4
Tabel I.2	Jumlah Pemanfaat dan Angsuran Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes Rempak Maju Jaya .....	8
Tabel II.1	Konsep Operasional Penelitian Implementasi Usaha Simpan pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.....	37
Tabel IV.1	Persentase Penggunaan Areal Pertanahan Desa Rempak Kecamatan sabak Auh Kabupaten Siak.....	47
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Desa Rempak Menurut Umar dan Jenis Kelamin .....	48
Tabel IV.3	Jumlah Masyarakat Desa Rempak Berdasarkan Agama Yang Mereka Anut .....	49
Tabel IV.4	Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Rempak .....	49
Tabel IV.5	Jenis Sarana Pendidikan di Desa Rempak.....	50
Tabel V.1	Keadaan Responden Berdasarkan Umur.....	56
Tabel V.2	Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
Tabel V.3	Keadaan Responden Berdasarkan Suku .....	57
Tabel V.4	Keadaan Responden Berdasarkan Pendidikan .....	59
Tabel V.5	Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	60
Tabel V.6	Jawaban Responden Mengenai Ketentuan Pinjaman ditetapkan oleh Direksi BUMDes dengan Implementasinya .....	67
Tabel V.7	Jawaban Responden Mengenai Pemberian Pinjaman Berdasarkan Skala Prioritas.....	68
Tabel V.8	Jawaban Responden Mengenai Prosedur Pinjaman telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu mengutamakan warga Desa Rempak yang berdomisili minimal 3 tahun dengan dibuktikan oleh KTP dan KK .....	70
Tabel V.9	Jawaban Responden Mengenai Apakah sudah Sesuai Ketika Pemanfaat Meminjam Lebih dari 25 Juta dengan Perjanjian Menggunakan Berita Acara.....	71
Tabel V.10	Jawaban Responden Mengenai Terdapat Peminjam yang berumur dibawah 20 Tahun atau Belum Menikah .....	74

Tabel V.11	Tanggapan Responden Mengenai Membuat Proposal Sesuai Dengan Format dan Dinilai Oleh Direksi dengan Melakukan Verifikasi Dilapangan.....	76
Tabel V.12	Jawaban Responden Mengenai Pemanfaat Bersedia Menerima Sanksi Serta Menanggung Biaya Administrasi...	78
Tabel V.13	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Ketentuan dan Prosedur Peminjaman .....	80
Tabel V.14	Jawaban Responden Mengenai Apakah Proposal dari Pemanfaat yang masuk Dicatat dalam Buku Antrian dan Diverifikasi oleh direksi menurut Urutan.....	83
Tabel V.15	Jawaban Responden Mengenai apakah Sudah sesuai Apabila Pengembalian Pinjaman yang Lewat Jatuh Tempo dikenakan Denda Sesuai Ketentuan .....	85
Tabel V.16	Jawaban Responden Mengenai Pemanfaat yang Melunasi Pinjaman dan Dapat Mengajukan Pinjaman Berikutnya Sudah Terlaksana dengan Baik .....	88
Tabel V.17	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Mekanisme Pencairan dan Pengembalian.....	89
Tabel V.18	Jawaban Responden Mengenai Pemanfaat yang Meminjam yang Tidak Memberikan Agunan .....	92
Tabel V.19	Jawaban Responden Mengenai syarat Agunan Memberatkan Masyarakat/Bagi Calon Pemanfaat .....	93
Tabel V.20	Jawaban Responden Mengenai Pernah ada Pemanfaat yang memberikan Agunan Tidak Sah/Palsu dan Diterima Oleh Direksi Sebagai Jaminan .....	94
Tabel V.21	Jawaban Responden Mengenai Direksi Sudah Menjalankan Tugasnya Membuat Inventaris Untuk Keamanan Agunan .....	96
Tabel V.22	Jawaban Responden Mengenai Suku Bunga yang Ditetapkan Oleh BUMDes sebesar 18%/Tahun atau 1,5%/Bulan tidak Memberatkan Masyarakat .....	97
Tabel V.23	Jawaban Responden Mengenai Suku bunga dan lama waktu peminjaman yang lebih dari 25 juta ditentukan melalui berita acara .....	99
Tabel V.24	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Agunan dan Suku Bunga .....	100
Tabel V.25	Jawaban Responden Mengenai Diberikan Sanksi Kepada Anggota Pengurus BUMDes yang tidak Pernah Mengikuti Rapat (Minimal Rapat Tahunan).....	104

Tabel V.26	Jawaban Responden Mengenai Pernahkah Anggota dan pengurus BUMDes yang Menyalahi Ketentuan AD/ART serta Peraturan Khusus dikeluarkan dari Keanggotaan dan Kepengurusan.....	105
Tabel V.27	Jawaban Responden Mengenai Denda yang Dikenakan Pihak Pemanfaat karna tidak membayar tepat Waktu Sudah Sesuai dengan Aturan yang Berlaku .....	106
Tabel V.28	Jawaban Responden Mengenai Pengurus BUMDes Memberikan Surat Teguran/Pemanggilan dan Melakukan Pelelangan Agunan Kepada Pemanfaat yang Menunggak sampai Bulan Ke 4 .....	108
Tabel V.29	Jawaban Responden Mengenai Pengurus yang Menyalahkan Kewenangan/Keuangan BUMDes diberikan Sanksi .....	109
Tabel V.30	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Sanksi-Sanksi	111
Tabel V.31	Rekapitulasi Jawaban Responden Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.....	113

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar IV.1 Bagan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) Desa rempak Kecamatan sabak Auh Kabupaten Siak.....	54
--	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hakekat dari pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjadi cita-cita Nasional untuk pemerataan pembagian hasil pembangunan. Pada umumnya pembangunan Nasional di negara-negara baru berkembang dipusatkan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi mikro dan makro, untuk mendukung pencapaian tujuan suatu negara dan untuk mendorong perubahan-perubahan perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik.

Keberhasilan suatu pembangunan tentunya disertai dengan sistem yang baik. Begitu juga dengan program-program yang dijalankan pemerintah harus terus berorientasi terhadap rakyat, oleh sebab itu pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur yang ada di daerah. Sasarannya adalah sumber daya manusia yang merupakan kunci utama dari pelaksanaan pembangunan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berhak mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing dengan Sumber Daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 154 yang menjelaskan tentang tahapan,

tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada Perundang-Undangan.

Berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut pemerintah Provinsi Riau mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur daerahnya dengan memanfaatkan potensi yang ada guna mensejahterakan masyarakat Riau. Upaya mensejahterakan masyarakat Riau, Pemerintah Provinsi Riau menyusun beberapa program yang salah satunya tertuang di Agenda Nasional (Propenas) dan keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan Desa (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis. Program pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa. Penanggulangan kemiskinan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Adapun jenis kegiatan PPD pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya pemerintah Provinsi Riau untuk menanggulangi masalah kemiskinan, kebodohan, dan Infrastruktur (K2I).

Sedangkan menurut peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, seluruh proses kegiatan PPD pada hakikatnya memiliki 3 dimensi, yaitu:

1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat Desa.

Dalam implementasinya jenis kegiatan program pemberdayaan Desa meliputi :

1. Kegiatan reguler perencanaan pembangunan Desa melalui sektoral.
2. Kegiatan di bidang ekonomi melalui Dana Usaha Desa (DUD) yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP).

Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan pemberian dana pinjaman bagi pengusaha menengah ke bawah. Dana ini berasal dari alokasi dana shering pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Desa. Sebagaimana tertuang surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/Sj Tentang Pedoman Alokasi Dana Shering dari

Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/kota Kepada Desa tanggal 22 Maret 2005.

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang juga mendukung Provinsi Riau untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur yang termasuk dalam visi dan misi Kabupaten Siak. Berbagai program yang bertujuan memberdayakan masyarakat yang telah dijalankan diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat Siak terutama dalam pengentasan kemiskinan namun sampai sekarang masih banyak rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Siak yang tersebar di beberapa Kecamatan. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Siak yang mendapatkan bantuan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam adalah Kecamatan Sabak Auh, sejak tahun 2007 hingga sekarang. Kecamatan Sabak Auh dinilai layak mendapatkan dana usaha desa karena memiliki banyak penduduk miskin. Ini dapat dilihat dari data berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Desa di Kecamatan Sabak Auh**  
**Kabupaten Siak**

No	Nama Desa	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Miskin	Tangga	Porsentase (%)
1.	Rempak	375	44		11.75%
2.	Laksamana	435	42		9.65%
3.	Sungai Tengah	412	39		9.57%
4.	Belading	398	38		9.54%
5.	Sabak Permai	542	47		8.67%
6.	Bandar Pedada	526	32		6.08%
7.	Bandar Sungai	495	25		5.05%
8.	Selat guntung	544	49		9.00%
<b>JUMLAH</b>		<b>3727</b>	<b>316</b>		<b>8.47%</b>

Sumber Data: *Camat Sabak Auh 2012*



Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Sabak Auh masih tergolong banyak, khususnya di Desa Rempak yang memiliki jumlah rumah tangga 375 dan terdapat 44 jumlah rumah tangga miskin atau 11.75%. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu program dianggap mampu menanggulagi kemiskinan yang di buat pemerintah Propinsi yang berkerjasama dengan Kabupaten, dengan memberikan dana usaha, dengan skala prioritas kepada Desa-desa yang memiliki jumlah rumah tangga miskin tergolong banyak.

Dari data rumah tangga miskin di Kecamatan Sabak Auh yang masih tergolong signifikan di beberapa desa yang kemudian dinilai layak mendapatkan bantuan dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Seperti Desa Rempak, Laksamana, Sungai Tengah, Belading, dan Bandar Sungai, dengan masing –masing memperoleh anggaran 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari dana Shering antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak.

Desa Rempak merupakan salah satu desa yang memperoleh dana usaha ekonomi desa simpan pinjam, dimana sebagian besar rumah tangga miskin di Kecamatan Sabak Auh bertempat tinggal di Desa Rempak. dalam rangka mensukseskan progam usaha ekonomi Desa simpan pinjam, perangkat Desa/tokoh masyarakat Rempak mengadakan musyawarah desa untuk membentuk kepengurusan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) maka terbentuklah dengan Nama Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Jaya Desa Rempak.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Rempak berdiri pada tahun 2007, sampai sekarang UED-SP Desa Rempak sudah berjalan sekitar 5 tahun. Dan Setelah berjalan selama 3 tahun UED-SP tersebut berubah menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat menuju kemandirian desa. maka UED-SP Desa Rempak berubah status menjadi BUMDes sebagaimana ketetapan Peraturan Desa No. 02 Tahun 2010 Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. Pembentukan BUMDes di Desa dimaksudkan menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rempak Maju Jaya di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh hanya masih mengelola pelayanan jasa yang berupa dana usaha simpan pinjam, yang sebelumnya program Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang merupakan program Pemerintah Provinsi Riau dengan kerjasama Pemerintah Kabupaten Siak, Setelah Desa Rempak membentuk BUMDes, maka program tersebut dibawah pengelolaan BUMDes artinya dana usaha simpan pinjam sepenuhnya milik Desa Rempak akan tetapi pendampingan dalam pengelolaannya masih

dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar BUMDes tersebut dapat berkembang serta tumbuh secara mandiri. Adapun usaha-usaha yang diberikan pinjaman dana simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya bermacam-macam yaitu, perkebunan, peternakan, Perdagangan, usaha kecil, perbengkelan dan lain-lainnya.

Agar BUMDes tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dibentuklah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan BUMDes, yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi pedoman dalam pengelolaannya tersebut. Untuk mengenai prosedur peminjaman dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) pada Pasal 8 menyebutkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Diutamakan warga Desa Rempak yang telah berdomisili minimal 3 tahun dengan dibuktikan mempunyai KTP dan KK
- 2) Pinjaman secara perorangan atau kelompok
- 3) Peminjaman lebih dari Rp 25 Juta dapat diberikan dengan perjanjian menggunakan Berita Acara
- 4) Peminjaman lebih dari Rp. 25 Juta Dapat diberikan dengan perjanjian menggunakan Berita Acara
- 5) Aturan-aturan peminjaman lebih dari Rp 25 Juta tercantum dalam aturan khusus BUMDes
- 6) Usia pemanfaat minimal 20 tahun atau sudah berkeluarga maksimal usia produktif
- 7) Tercatat sebagai anggota BUMDes, dengan membayar simpanan pokok Rp. 50.000
- 8) Membuat proposal sesuai format yang sudah ditentukan
- 9) Dinilai oleh Direksi, dengan melakukan verifikasi lapangan
- 10) Memiliki Agunan/jaminan surat berharga
- 11) Bersedia menerima sanksi yang ditentukan bila melanggar aturan
- 12) Bersedia menanggung biaya administrasi yang diakibatkan dari peminjaman

Sedangkan untuk mengenai suku bunga yang diterapkan dalam usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), yang terdapat pada Pasal 13 menyebutkan bahwa:

- 1) Suku bunga peminjaman BUMDes disepakati dalam Musyawarah Desa pertanggungjawaban Tahunan sebesar 18%/tahun atau 1.5%/bulan
- 2) Suku bunga dan lama waktu peminjaman bagi pemanfaat yang meminjam lebih dari Rp 25 juta ditentukan melalui Berita Acara

Suku bunga usaha ekonomi pada BUMDes Rempak Maju Jaya di atas ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan pengurus BUMDes dan perangkat Desa. Untuk mengenai penerapan suku bunga tersebut disesuaikan dengan besarnya pinjaman yang diberikan kepada pemanfaat. Berdasarkan data yang penulis dapat dari BUMDes Desa Rempak bahwa pelaksanaan usaha simpan pinjam di Desa Rempak terdapat beberapa permasalahan seperti banyaknya peminjam yang menunggak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel I.3 di bawah ini :

**Tabel I.2**  
**Jumlah Pemanfaat dan Angsuran Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes Rempak Maju Jaya**

No	Tahun	Jumlah pemanfaat	Angsuran		Persentase
			Lunas	Menunggak	
1	2008	118	103	15	12,71%
2	2009	76	48	28	36,84%
3	2010	63	47	16	25,40%
4	2011	70	47	23	32,86%
<b>Jumlah</b>		<b>327</b>	<b>245</b>	<b>82</b>	<b>25,08%</b>

Sumber: UED-SP Maju Jaya Desa Rempak

Dari tabel jumlah pemanfaat dan angsuran dapat di lihat bahwa pada tahun 2009 terjadi penunggakan yang besar sebanyak 28 pemanfaat atau 36,84% dari 76 pemanfaat, disebabkan pada tahun 2009 terjadi krisis ekonomi

global yang berdampak pada masyarakat terhadap pembayaran angsuran kredit dimana perekonomian melemah sedangkan angsuran kredit harus tetap berjalan. Pada tahun 2011 terjadi penunggakan sebanyak 23 pemanfaat atau 32,86 % dari 70 pemanfaat disebabkan oleh harga jual pertanian tidak stabil naik turun sedangkan harga komoditi yang lain semakin meningkat sedangkan sebagian besar dari pemanfaat dana usaha simpan pinjam adalah berpenghasilan dari pertanian dengan keadaan yang demikian mempersulit masyarakat dalam membayar angsuran. Dengan adanya penunggakan yang besar bisa mengakibatkan perguliran dana Usaha Simpan Pinjam Rempak Maju Jaya di Desa Rempak menjadi macet yang dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, akibat yang dirasakan akibat kredit macet diatas adalah ketidak pastian pencairan dana bagi yang berada pada daftar tunggu, karena dana yang akan diberikan kepada mereka adalah dana yang bersumber dari pengembalian pinjaman oleh pemanfaat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus BUMDes dengan Bapak (Asrol ) beliau Mangatakan:

*“ Untuk Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya sudah berjalan dengan baik namun masih ada kendala yang terjadi yaitu masih banyaknya terjadi penunggakan pembayaran dari pemanfaat, sehingga mengakibatkan daftar tunggu dananya tidak bisa di gulirkan kembali bagi pemanfaat selanjutnya, dan bukan itu saja seringnya peminjam dana BUMDes menyalagunakan pinjaman yang diberikan untuk usahanya tetapi digunakan untuk yang lainnya sehingga tidak dapat membayar angsuran tersebut”.*(Wawancara Senin, 10 Oktober 2012 Pukul 10:00 Wib).

Penulis juga mewawancarai warga Desa Rempak untuk mengenai pelaksanaan usaha ekonomi simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya di Desa Rempak dengan Ibu Suryani (penjual sayur) beliau mengatakan:

*“Kami juga mau meminjam dana usaha simpan pinjam untuk penambahan modal jualan kami tetapi saya tidak bisa memenuhi persyaratannya karna terlalu banyak persyaratannya terutama adanya agunan sedangkan saya tidak mampu untuk memberikan agunan”. ”(Wawancara Senin, 10 Oktober 2012 Pukul 14:00 Wib).*

Hasil wawancara di atas menyatakan syarat agunan usaha simpan pinjam pada BUMDes Desa Rempak memberatkan masyarakat miskin sehingga masyarakat yang tidak memiliki agunan untuk dijadikan jaminan tidak dapat mengajukan peminjaman dana usaha tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis mengenai Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Terjadi permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyaknya jumlah peminjam yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran dana bagi daftar tunggu.
2. Adanya penyalagunaan pinjaman dari pemanfaat bukan untuk usahanya melainkan untuk hal lain, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
3. Sulitnya pemohon untuk melengkapi persyaratan pinjaman, seperti adanya agunan dan permohonan proposal.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang : ***“ Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak”.***

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian ini, yang berupa :

1. Bagaimana Implementasi Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak ?
2. Apa faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dimasa mendatang, terutama dalam Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Secara akademis, sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
4. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.
5. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi tentang Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membagi ke dalam enam bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**



Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka, variabel penelitian dan definisi konsep.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Bab ini berisikan gambaran umum Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh, kondisi umum Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya yaitu : struktur organisasi, uraian tugas, dan keadaan BUMDes.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas identitas responden, hasil pengolahan data tentang Implementasi usaha simpan pinjam pada BUMDes Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran, daftar pustaka, dan lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai salah satu instrumen dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah.

Istilah ‘kebijakan’ dalam bahasa inggris “policy” yang berasal dari bahasa latin, yaitu kata *polis* yang artinya *commuty* atau penguyuban (persekutuan) hidup manusia, masyarakat atau city (negara kota).

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan latin.”akar kata dalam bahasa yunani dan sangsekerta adalah *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan”. (William N. Dunn,2003:51)

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (dikutip Subarsono,2005:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever goverments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Kebijakan publik menurut James E. Anderson (dikutip Subarsono,2005:2) mendefinisikan kebijakan

publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Carl Friedrich (dikutip Samodra Wibawa, 2011:2) melihat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Menurut Tangkilisan (2008:3), kebijakan dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Richard Rose (dikutip Samora Wibawa, 2011:2) berpendapat, bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri.

Menurut Edi Suharto (2007:7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Eulau dan Prewitt (*Ibid*) kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik atau tidak dilihat dari komponen *Public policy* yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Intentions, yaitu niat/tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan
2. Goals, yaitu tujuan/keadaan akhir yang hendak dicapai

3. Plans Or Proposals, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan
4. Program, yaitu program yang disahkan untuk mencapai tujuan kebijakan.
5. Decisions or choices, yaitu keputusan atau pilihan atas tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
6. Effect, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat diukur

Kebijakan publik adalah suatu keputusan/seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang mengandung nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya (LAN,2005:106).

Menghadapi masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan kerana ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat mengganggu dan merusak tatanan sosial (seperti kenakalan remaja).

Sedangkan menurut Nugroho (2009:85) bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Dari sudut sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, kebijakan publik berlangsung pada tatanan organisasi pemerintahan diseluruh wilayah Negara, disamping itu kebijakan publik terkait erat dengan

permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia (ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan) yang sangat kompleks dan dinamis. Kebijakan publik sebagai keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara meliputi:

1. Merupakan kebijakan yang berupa pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
2. Bertujuan menghadapi situasi permasalahan tertentu yang bermakna demi kepentingan publik, dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, aman dan sejahtera;
3. Memandu penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah;
4. Berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, yang dikeluarkan oleh lembaga Negara yang berwenang (LAN,2005:106).

berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat para ahli di atas disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan negara. Kebijakan publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan yang berbentuk

implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri,

Secara sederhana bentuk kebijakan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu UUD 1945, UU/Praturan pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.
3. Kebijakan publik bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota (Nugroho,2009:92).

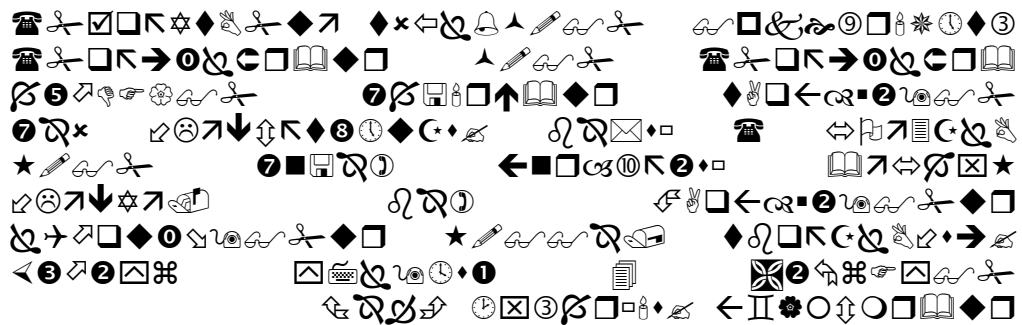
Proses kebijakan publik dapat dipandang sebagai rangkaian yang meliputi paling tidak tiga kelompok tahapan kegiatan utama, yaitu:

1. Pembuatan atau perumusan kebijakan (merekpresentasikan fungsi manajemen perencanaan), yang meliputi:
  - a. Penyusunan agenda kebijakan
  - b. Perumusan kebijakan

2. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan (merekpresentasikan fungsi manajemen: pelaksanaan/actuating); dan
3. Evaluasi kinerja kebijakan (mempresentasikan fungsi manajemen: controlling). Yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan, pengawasan (internal dan eksternal) dan pertanggungjawaban *akuntabilitas* (Nugroho,2004:123).

Dalam Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa'

ayat 59 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa:59)

## 2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus *Webster* merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying*

*out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (Menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 2005:64)

Berbagai program yang telah dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah diformulasikan dalam kebijakan publik wajib implementasikan, atau dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun unit-unit organisasi pemerintahan di tingkat bawah, melalui mobilisasi sumberdaya finansil dan manusia.

Keberhasilan sebuah kebijakan juga diiringi dengan pelaksanaannya yang baik. Bila Cuma kebijakannya saja baik, tetapi tidak diikuti pelaksanaan/implementasi yang baik, maka pencapaian terget yang mudah dicita-citakan sebelumnya yang tergambar di dalam tujuan kebijakan, kemungkinan tidak akan dapat tercapai secara optimal. Kebijakan dan implementasi seharusnya saling mendukung dan saling berjalan selaras.

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Solichin Abdul Wahab, 2005:65) sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual-individual/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.



Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimalnya tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
3. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Untuk mencapai keberhasilan kebijakan publik, ada beberapa indikator penentunya, sebagaimana dikatakan Soren Winter (dikutip Nugroho,2009:233) ada empat variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi:

1. Proses formasi kebijakan
2. Prilaku organisasi pelaku implementasi
3. Prilaku birokrat di tingkat bawah (*street0level uraucrats*)
4. Respon kelompok terget kebijakan dan perubahan dalam masyarakat

Selain faktor yang empat diatas, keberhasilan dari implementasi kebijakan publik juga harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gunn (dikutip Nugroho,2004:171-174), untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat:

1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar;
2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu;
3. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada;
4. Apakah kebijakan yang diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal;
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi;
6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil;
7. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar;
9. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna
10. Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

### **2.3 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara sendiri (PERGUB Riau No. 78 Tahun 2009: Kebijakan Umum).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. (Suharto, 2006:76), Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/kelompok yang diberdayakan.

Menurut Eko (2004:11 ) pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian masyarakat. Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan insitusi semacam lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok-kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat dan bebas kebodohan, kelaparan, dan kemiskinan.
2. Menjangkau sumber produktif yang mungkin mereka dapat untuk meningkatkan pendapatnya.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi (Suharto, 2006:59)

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek, sehingga diharapkan dapat mampu menciptakan masyarakat yang berdiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga yang demikian dapat mengembangkan kehidupan masyarakat.

Menurut Zubaedi (2007:18) mengemukakan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan efektif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Lebih lanjut Zubaedi menjelaskan pengembangan masyarakat sering kali diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan:

1. program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukungan dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak lain yang bertanggung jawab (Ibid:19).

Program yang dibuat untuk memberdayakan masyarakat, terlaksana apabila masyarakat berpartisipasi dalam program tersebut. Sebagaimana dikatakan Wahyudi Sumpeno (dikutip Mudiyono Dkk, 2005:115-116) memberikan penegasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat agar pembangunan itu lebih memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat dan lebih terarah pada tujuan pengembangan masyarakat itu sendiri, yang ia ungkapkan sebagai berikut:

1. Pembangunan sumberdaya manusia tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun dari pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumberdaya pendukung lebih banyak dimiliki individu, kelompok, atau organisasi masyarakat.
2. Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program dengan baik termasuk dalam tujuan, pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman dalam menggunakan teknologi untuk kepentingan bersama.
3. Masyarakat akan termotivasi untuk bekerja bersama dalam program-program pembangunan manakala mereka ikut bertanggung jawab di dalamnya.

4. Dalam kehidupan demokratis secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan dan harapan yang ingin dicapainya.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkannya, disamping itu masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggungjawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut.

Maka, dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber strategis, karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia mengarahkan mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang dimiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia.

Menurut Sumidiningrat (1999:121) peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi harus menganut beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (*acceptable*)
2. Dikelolah oleh masyarakat secara terbuka dan dapat di pertanggungjawabkan (*accountable*)

3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*)
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (*sustainable*)
5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Program pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan bantuan dana harus mengandung unsur-unsur yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program tersebut harus bisa mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatannya secara ekonomis, bukannya konsumtif.

#### **2.4 Usaha Ekonomi Simpan Pinjam**

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan diperlukan proses pemberdayaan. Program pemberdayaan Desa melalui sector Usaha Ekonomi Simpan Pinjam merupakan salah bentuk program penanggulangan kemiskinan bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana Usaha Desa menuju kemandirian desa. Dana Usaha Desa adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada rekening Desa dan hanya di dapatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara kelompok atau perorangan melalui lembaga Usaha Ekonomi Simpan Pinjam, program pemberdayaan Desa sector usaha ekonomi simpan pinjam merupakan lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga untuk menyalurkan

dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut. (PERGUB Riau No. 78 Tahun 2009: Kebijakan Umum).

## **2.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa tersebut, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa Yaitu:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. ( Soemantri, 2010:39)

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 merupakan perda yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang



berlandaskan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada Pasal ayat 1 menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan ditambah pula PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang terdapat pada Pasal 78, 79, 80 dan 81. Sedangkan untuk mengenai permodalan BUMDes dapat diperoleh dari berbagai sumber sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Siak No. 18 Tahun 2007 disebutkan yaitu sebagai berikut:

- a. Modal sendiri yang diusahakan oleh Pemerintah Desa yakni modal yang berasal dari kekayaan Desa atau aset Desa merupakan aset yang dipisahkan pembukuannya;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan, yang berasal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
- d. Sumbangan pihak lain yang sah;
- e. Pinjaman, yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan dan lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan;
- f. Modal penyertaan dalam bentuk penyertaan modal masyarakat Desa, pihak lain, atau kerjasama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan.

BUMDes Rempak Maju Jaya di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh didirikan dan dikelola berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga (AD/ART), dalam pasal 2 Anggaran Dasar (AD) menyebutkan bahwa BUMDes tersebut, dikelola berdasarkan asas-asas yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi, pengelolaan kegiatan BUMDes harus terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas,
2. Akuntabel, pengelolaan kegiatan BUMDes harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa,
3. Partisipasi, masyarakat dan anggota warga masyarakat Desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.
5. Akseptabel, keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh masukan dari semua pihak.
6. Otonomi, pengelolaan BUMDes didasarkan pada perhitungan-perhitungan profesional perusahaan yang tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan atau kepentingan lainnya.
7. Keterpaduan, pengelolaan BUMDes terpadu dengan kegiatan ekonomi lainnya di Desa.

8. Kewasdayaan, Masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan modal BUMDes dengan demikian masyarakat merasa ikut memilikinya.

Sedangkan untuk mengenai tujuan dan fungsi didirikan BUMDes Rempak Maju Jaya di Desa Rempak diatur dalam Anggaran Dasar (AD) yang terdapat dalam pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa:

1. BUMDES dibentuk dengan tujuan :
  - a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa;
  - b. Memajukan perekonomian Desa;
  - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
  - e. Meningkatkan pengelolaan aset - aset Desa yang ada.
2. BUMDES berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan cara :
  - a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada;
  - b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
  - c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi Desa dan mengurangi pengangguran;
  - d. Membantu Pemerintah Desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di Desanya;

- e. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat Desa.

Didalam Anggaran Dasar (AD) juga diatur jenis-jenis usaha yang dikelola BUMDes Rempak Maju Jaya, sebagaimana terdapat pada Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan lembaga keuangan mikro yang telah ada di Desa;
2. Pelayanan jasa antara lain simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik Desa dan lain sejenisnya;
3. Penyaluran 9 ( sembilan ) bahan pokok;
4. Perdagangan umum antara lain hasil pertanian, pertambangan, industri kecil dan kerajinan rakyat.
5. Pasar Desa;
6. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi Desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat antara lain wisata Desa dan pengelolaan galian c.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang Implementasi Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sudah pernah dilakukan penelitian oleh peneliti diantaranya yaitu:

Nama Resdati, dengan judul Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Buluh Cina Mandiri di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Di Universitas Riau pada tahun 2011. Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan UED-SP

Buluh Cina Mandiri pada bulan juni tahun 2010 adalah dari 90 pemanfaat UED-SP sebanyak 78 (87%) pemanfaat dalam pelaksanaanya berjalan dengan lancar pengembalian dana UED-SP dan pemanfaat yang mengalami *off target* atau keterlambatan dalam pengembalian dana karena berbagai alasan berjumlah 12 orang (13%) misalnya responden yang menggunakan satu nama namun dalam penggunaannya digunakan untuk 2 orang dialami oleh responden yang bekerja sebagai tukang kayu. Dana UED-SP diberikan kepada sang istri untuk berwirausaha penjualan kain secara kredit kepada masyarakat di kecamatan Siak Hulu. Barang dagangan yang dijual secara angsuran kepada konsumennya mengalami kemacetan dengan alasan tidak memiliki uang sehingga juga berakibat kepada istri responden mengalami kegagalan dalam berwirausaha serta harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan anaknya yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Tabrani Rab, dengan macetnya usaha yang dilakukan istri responden juga menyebabkan kemacetan dalam pengembalian dana di UED-SP.

Nama Dewi Karnova, dengan judul Evaluasi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Singingi di Universitas Riau pada tahun 2012 dengan hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Evaluasi program UED-SP Harapan Bunda di desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan alat evaluasi *Input, Proses, Output, Outcome, Impact*

dan *Feedback* “tidak berhasil” karena tidak tercapainya semua indikator yang telah ditentukan.

2. Faktor-faktor yang menghambat program UED-SP Harapan Bunda di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Faktor Budaya.

Adapun alasan penulis untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Ekonomi Simpan Pinjam pada BUMDes di Desa Rempak yaitu, penelitian ini mempunyai permasalahan yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tunggakan yang besar, pihak pemanfaat yang menggunakan dana pinjaman bukan untuk usahanya melainkan untuk keperluan lainnya, adanya persyaratan berupa agunan yang memberatkan masyarakat miskin, serta tempat penelitian ini dilakukan pada BUMDes Rempak Maju Jaya di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh.

## 2.7 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Masri Singarimbun, 1989: 33). Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*events*) yang berkaitan satu sama dengan lainnya.

Defenisi konsep dimaksudkan untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang menjadi defenisi konsep pada penelitian ini adalah:

1. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.
2. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.
4. Ketentuan peminjaman adalah suatu aturan yang harus dipenuhi oleh pemanfaat dan pengelola BUMDes.
5. prosedur adalah susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lain.
6. Mekanisme Pencairan dan Pengembalian Dana adalah proses dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemanfaat pada BUMDes
7. Agunan adalah suatu barang/surat berharga yang dijadikan sebagai jaminan
8. Suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman
9. Sanksi-Sanksi adalah hukuman yang diterapkan jika melanggar aturan yang telah ditetapkan

## 2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Masri Siangarimbun,1989:46), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi indikator Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan hasil musyawarah Desa yang membentuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Maju Jaya yaitu :

- a. Ketentuan dan Prosedur Peminjaman :
  1. Ketentuan pinjaman ditetapkan oleh direksi BUMDes
  2. Pemberian pinjaman berdasarkan skala prioritas
  3. Diutamakan warga Desa Rempak yang berdomisili minimal 3 tahun dengan dibuktikan oleh KTP dan KK
  4. Pinjaman maksimal Rp.25 juta lebih dari itu diatur dalam BUMDes
  5. Usia pemanfaat minimal 20 tahun/sudah berkeluarga maksimal usia produktif
  6. Membuat proposal sesuai dengan format dan dinilai oleh direksi dengan melakukan verifikasi di lapangan
  7. Bersedia menerima sanksi dan menanggung biaya administrasi
- b. Mekanisme Pencairan dan Pengembalian Dana
  1. Proposal dari pemanfaat yang masuk dicatat dalam buku antrian dan kemudian diverifikasi oleh direksi menurut urutan
  2. Pengambilan pinjaman sesuai dengan surat perjanjian (SP2K) dan apabila telah jatuh tempo harus membayar denda
  3. Pemanfaat yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya
- c. Agunan dan Suku
  1. Agunan harus asli dan agunan tersebut dinilai dan ditetapkan oleh direksi
  2. Keamanan agunan menjadi tanggung jawab direksi dengan membuat daftar inventaris
  3. Suku bunga BUMDes sebesar 18%/tahun atau 1.5%/bulan
  4. Suku bunga dan lama waktu pinjaman yang lebih dari 25 juta ditentukan melalui berita acara
- d. Sanksi-Sanksi



1. Sanksi bagi anggota dan pengurus BUMDes
2. Sanksi khusus bagi pemanfaat
3. Sanksi bagi pengurus

**Tabel 2.1. Konsep Operasional Penelitian “Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.**

<b>Konsep Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Item Penilaian</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Implementasi Usaha Ekonomi Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak	1. Ketentuan dan Prosedur Peminjaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan pinjaman ditetapkan oleh direksi BUMDes</li> <li>b. Pemberian pinjaman berdasarkan skala prioritas</li> <li>c. Diutamakan warga Desa Rempak yang berdomisili minimal 3 tahun dengan dibuktikan oleh KTP dan KK</li> <li>d. Pinjaman maksimal Rp.25 juta lebih dari itu diatur dalam BUMDes</li> <li>e. Usia pemanfaat minimal 20 tahun/sudah berkeluarga maksimal usia produktif</li> <li>f. Membuat proposal sesuai dengan format dan dinilai oleh direksi dengan melakukan verifikasi di lapangan</li> <li>g. Bersedia menerima sanksi dan menanggung biaya administrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai</li> <li>b. Cukup Sesuai</li> <li>c. Kurang Sesuai</li> <li>d. Tidak Sesuai</li> </ol>

- |  |   |
|--|---|
| 2. Mekanisme Pencairan dan Pengembalian Dana | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proposal dari pemanfaat yang masuk dicatat dalam buku antrian dan kemudian diverifikasi oleh direksi menurut urutan</li> <li>b. Pengambilan pinjaman sesuai dengan surat perjanjian (SP2K) dan apabila telah jatuh tempo harus membayar denda</li> <li>c. Pemanfaat yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya</li> </ul>        |
| 3. Agunan dan Suku Agunan                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Agunan harus asli dan agunan tersebut dinilai dan ditetapkan oleh direksi</li> <li>b. Keamanan agunan menjadi tanggung jawab direksi dengan membuat daftar inventaris</li> <li>c. Suku bunga BUMDes sebesar 18%/tahun atau 1.5%/bulan</li> <li>d. Suku bunga dan lama waktu pinjaman yang lebih dari 25 juta ditentukan melalui berita acara</li> </ul> |
| 4. Sanksi-Sanksi                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sanksi bagi anggota dan pengurus BUMDes</li> <li>b. Sanksi khusus bagi pemanfaat</li> <li>c. Sanksi bagi pengurus</li> </ul>  |

Sumber: *Data Olahan 2012*

## 2.9 Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan skala likert. Jawaban dari setiap instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari Sesuai, Cukup Sesuai, Kurang Sesuai dan Tidak sesuai. Dengan mengacu kepada pendapat Arikunto Suharsimi (2006: 77) adapun criteria prosentase sebagai berikut :

- |   |           |
|---|-----------|
| a. Sesuai /Baik/Memberatkan/Selalu      | : 75-100% |
| b. Cukup Sesuai/Baik/Memberatkan/Sering | : 56-74 % |

- c. Kurang Sesuai/Baik/Memberatkan/Kadan-Kadang : 49-55%
- d. Tidak Sesuai/Baik/Memberatkan/ Tidak Pernah : 0-49%

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, tentang Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun alasan dipilihnya tempat ini sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa kantor BUMDes Desa Rempak adalah bukan bank yang dibentuk oleh pemerintah Desa yang bersangkutan, untuk mengelola dan menyalurkan Dana Usaha Desa kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. Disamping itu juga peneliti ingin melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan administrasi BUMDes yang ada di Desa Rempak.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, Pada Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes Maju Jaya. Peneliti memilih daerah ini karena berdasarkan pengamatan penulis, terdapat permasalahan yang perlu penanganan lebih lanjut khususnya tentang masalah penelitian penulis yaitu masalah. Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes. Penelitian ini dilakukan mulai dari 01 Oktober - 30 Desember tahun 2012.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi dari objek atau subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2003 : 90).

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 76 yang terdiri dari 4 orang pengelola BUMDes, 1 orang Kepala seksi pemberdayaan Kecamatan Sabak Auh, 1 orang pendamping BUMDes Kecamatan Sabak Auh , 1 orang kepala Desa Rempak dan 70 orang pemanfaat BUMDes Maju Jaya. Sedangkan Ketua Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya penulis jadikan *Key Informan*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dibawah ini:

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelola BUMDes Maju Jaya

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Kecamatan Sabak Auh
3. Pendamping BUMDes Kecamatan Sabak Auh
4. Kepala Desa Rempak
5. Anggota pemanfaat BUMDes Maju Jaya

### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh polpulasi tersebut (Sugiono : 2010 :91).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah, untuk pemanfaat yang berjumlah 70 orang dilakukan secara sensus (Sampling Jenuh),dimana semua populasi dijadikan responden penelitian karena jumlah populasi relative sedikit maka penulis menggunakan sampel dari jumlah populasi.

## **3.4 Subjek dan Objek Penelitian**

### **3.4.1 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang atau individu yang dapat memberikan keterangan atau informasi kepada peneliti. Yang menjadi subjek penilitian pada penelitian ini adalah pihak pengelola dan pemanfaat Usaha Simpan Pinjam Pada Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### **3.4.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes Maju Jaya Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh. Menurut Husen Umar

(2005:303) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut : “Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, biasa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.”

### **3.5 Sumber Data**

#### **3.5.1 Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner, wawancara (*interview*), dan observasi. Berupa identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang bagaimanakah Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Adapun data yang diperoleh dari nara sumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan penelitian tersebut. tentunya yang berkaitan dengan Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, diantaranya:

1. Jawaban responden terhadap kuesioner
2. Jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan wawancara
3. Hasil observasi penulis di lapangan

#### **3.5.2 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang sudah di publikasikan atau diolah oleh instansi yang terkait. Data ini dapat berupa arsip, buku, literatur, serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan jenis dan proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Adapun data di peroleh meliputi:

1. Undang-undang (Perda BUMDes)
2. Peraturan Desa (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)
3. Data usaha alamat dan jenis usaha simpan pinjam dari masyarakat penerima bantuan dana Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya
4. Letak geografis, Monografi Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh
5. Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan lain-lain.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno Hadi (dalam Sugiono, 2010:145) atau dengan kata lain suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan dengan menggunakan alat

indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung. Jadi disini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Dalam kaitan penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh.

#### **b. Kuesioner (Angket)**

Kuesiner (angket) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiono, 2010:142) atau dengan kata lain pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden mengenai Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, dimana koesioner (angket) dalam penelitian ini adalah Pemanfaat Usaha Simpan Pinjam BUMDes sebanyak 70 orang.

#### **c. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan data yang diperlukan. Teknik ini dipilih karena ada kalanya data yang dibutuhkan belum begitu sempurna terjaring dengan teknik kuesioner. Dalam Penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak Kepala Desa Rempak, 3 orang pengelola BUMDes, 10 orang pemanfaat BUMDes.



### 3.7 Analisa Data

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, kemudian data dituangkan kedalam bentuk Tabel-tebel dengan angka dan prosentase untuk selanjutnya dianalisa dengan deskriptif analisa. dalam menganalisis penulis akan menuangkannya dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan prosentase dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana:

P = Prosentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Penentuan Kriteria penilaian dilakukan pengelompokkan menjadi 4 kriteria penelitian yaitu sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai.

Adapun Kriteria prosentase tersebut sebagai berikut :

- e. Sesuai /Baik/Memberatkan/Selalu
- f. Cukup Sesuai/Baik/Memberatkan/Sering
- g. Kurang Sesuai/Baik/Memberatkan/Kadan-Kadang
- h. Tidak Sesuai/Baik/Memberatkan/ Tidak Pernah

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Keadaan Geografis Desa Rempak**

Desa Rempak merupakan salah satu desa diantara 8 desa yang berada di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura. Desa Rempak terletak di sebelah timur ibukota Kecamatan Sabak Auh. Adapun batas-batas dari Desa Rempak adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selat Guntung
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Belading
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Laksamana
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Siak

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura, maka wilayah Desa Rempak ini mempunyai jarak :

1. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi  $\pm$  130 Km
2. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten  $\pm$  60 Km

### 3. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan $\pm$ 12 Km

Adapun luas Desa Rempak adalah 2.840 Hektar, sebagian besar terdiri dari perkebunan kelapa sawit, perumahan masyarakat, fasilitas umum desa dan sebagian kecil daerah rawa dan hutan.

Untuk lebih jelasnya, persentase penggunaan areal pertanahan Desa Rempak dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut :

**Tabel IV.1**  
**Persentase Penggunaan Areal Pertanahan Desa Rempak Kecamatan**  
**Sabak Auh Kabupaten Siak**

No	Penggunaan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1	Perumahan	895	31,5 %
2	Perkebunan	1605	56,5 %
3	Fasilitas Umum Desa	315	11,1 %
4	Rawa dan Hutan	25	0,9 %
Jumlah		2840	100 %

*Sumber : Kantor Kepala Desa Rempak 2012*

Dari tabel diatas terlihat bahwa penggunaan areal pertanahan Desa Rempak sebagian besar digunakan untuk perkebunan yaitu 1605 Hektar atau 56,5 %, untuk perumahan seluas 896 Hektar atau 31,5 %, kemudian Fasilitas Umum Desa seperti jalan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana olahraga, pasar, dan lain-lain penggunaanya seluas 314 hektar atau 11,1 %, dan luas rawa dan hutan yang ada di Desa Rempak hanya 25 Hektar atau 0,9 %.

## 4.2 Penduduk

Penduduk yang berdomisili di Desa Rempak pada umumnya adalah orang suku ocu, jawa, dan melayu. Namun beberapa tahun terakhir sudah ada beberapa pendatang yang berasal dari Sumatra Utara. Berdasarkan perhitungan penduduk sampai akhir tahun 2012 jumlah penduduk Desa

Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura berjumlah 1701 jiwa yang terdiri dari 375 KK.

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk Desa Rempak menurut jenis kelamin dan umur.

**Tabel IV.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Rempak Menurut Umur dan Jenis Kelamin**

No	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	0-9 Tahun	142	8,3 %
2	10-19 Tahun	228	13,4 %
3	20-29 Tahun	260	15,3 %
4	30-39 Tahun	342	20,1 %
5	40-49 Tahun	303	17,8 %
6	50-59 Tahun	212	12,5 %
7	60-69 Tahun	141	8,3 %
8	70 Tahun keatas	74	4,3 %
<b>Jumlah</b>		<b>1701</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Rempak 2012*

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Rempak kelompok usia 30-39 tahun merupakan kelompok usia yang paling produktif dengan jumlah 342 orang atau 20,1 %, dan jumlah yang paling sedikit adalah kelompok usia 70 Tahun keatas dengan jumlah 74 orang atau 4,3 % dari jumlah penduduk Desa Rempak.

#### **4.3 Agama Penduduk**

Mayoritas penduduk Desa Rempak adalah Suku Ocu Melayu dan Jawa yang sangat kuat memeluk agama Islam, meskipun beberapa tahun terakhir

ada pendatang yang berasal dari Sumatera Utara yang memeluk agama Kristen.

Berdasarkan komposisi penduduk yang ada di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.3**  
**Jumlah Masyarakat Desa Rempak Berdasarkan Agama Yang Mereka Anut**

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	1679	98,71 %
2	Kristen	22	1,29 %
<b>Jumlah</b>		<b>1701</b>	

*Sumber : Kantor Kepala Desa Rempak 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Rempak beragama Islam dengan jumlah 1679 orang atau 98,71%, dan yang beragama Kristen berjumlah 21 orang atau 1,29%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak adalah beragama Islam.

Berbicara mengenai Agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana peribadatan yang ada di Desa Rempak, adapun sarana peribadatan yang ada di Desa Rempak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.4**  
**Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Rempak**

No	Sarana Pribadatan	Jumlah
----	-------------------	--------

1	Masjid	3
2	Musholla	5
3	Gereja	-
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Rempak 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang berada di Desa Rempak terdiri dari 3 Masjid, 5 Musholla, dan tidak terdapat Gereja. Jumlah tesebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak adalah beragama Islam.

Sejauh pengamatan penulis di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak kondisi tempat ibadah termasuk dalam kondisi layak dan terawat dengan baik, sebab dari 3 Masjid dan 5 Musholla yang ada di Desa Rempak semuanya masih terpakai oleh warga yang berada di sekitar tempat-tempat ibadah tersebut untuk melakukan ibadah sholat berjamaah dan mengaji.

#### 4.4 Pendidikan

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Desa Rempak menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tidak banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf dalam artian banyak penduduk yang sudah bisa membaca dan menulis. Penduduk yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis adalah orang tua yang berumur diatas 60 tahun, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu belum banyak tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel IV.5**  
**Jenis Sarana Pendidikan di Desa Rempak**

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	2 Unit

2	Sekolah Dasar (SD)	2 Unit
3	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1 Unit
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	2 Unit
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SLTA)	1 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Rempak 2012*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Rempak cukuplah memadai untuk sebuah desa. Itu dapat dilihat dengan adanya 2 (dua) Taman Kanak-Kanak, 2 (dua) Sekolah Dasar, 1 (satu) Madrasah Diniyah Awaliyah, 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dan dapatlah diambil pemahaman bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Rempak sudah mulai kearah yang lebih baik dengan tidak banyaknya penduduk yang buta huruf karena tidak mengenyam pendidikan.

#### **4.5 Kesehatan**

Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sudah mengalami kemajuan, karena sudah adanya Puskesmas Desa, dimana keberadaan Puskesmas Desa sangat membantu masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan seperti cek kesehatan, Keluarga Berencana , pemeriksaan kehamilan sampai proses persalinan, dan pemeriksaan kesehatan masyarakat lainnya.

#### **4.6 Gambaran Umum Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Rempak**

Usaha Simpan Pinjam merupakan Program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Rempak pertama kali dibentuk

pengurusannya dengan jumlah pengelola tiga orang, yang terdiri dari ketua, Tata Usaha dan Kasir, setelah berjalan 3 tahun Program Usaha Ekonimi Desa Simpan Pinjam berubah menjadi BUMDes pada tanggal 28 Oktober 2010 berdasarkan Peraturan Desa Rempak Nomor 02 Tahun 2010 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa.

Adapun yang menjadi alasan termasuk Desa Rempak menjadi salah satu Desa yang menerima Dana Usaha tersebut adalah mengingat Desa rempak termasuk yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang cukup banyak, yaitu 44 KK. Melihat angka kemiskinan di Desa Rempak, perlu rasanya untuk menanggulangnya, sehingga Desa ini dipilih menjadi salah satu Desa yang mendapat Dana Usaha Desa yang bersumber dari Dana Sharing APBD Provinsi dengan Kabupaten/kota untuk diberikan kepada masyarakat miskin dalam bentuk pinjaman sebagai dana usaha.

Adapun tugas masing-masing pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak :

e. Peran Manajer BUMDes

- 1) Manajer BUMDes bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang dibawah wewenangnyanya
- 2) Manajer BUMDes bertindak sebagai pengendalian unit kerja yang dibawah wewenangnyanya
- 3) Manajer BUMDes bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada dibawah wewenangnyanya



- 4) Manajer BUMDes bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- 5) Manajer BUMDes bertindak sebagai entrepreneur, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMDes
- 6) Manajer BUMDes bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUMDes
- 7) Manajer BUMDes bertindak sebagai tokoh (figurehead) dalam melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUMDes dalam acara-acara penting
- 8) Manajer BUMDes bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris

f. Peran Sekretaris

- 1) Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari
- 2) Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan
- 3) Menyusunan laporan kinerja unit usaha
- 4) Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMDes
- 5) Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- 6) Bertanggungjawab kepada Manajer Unit

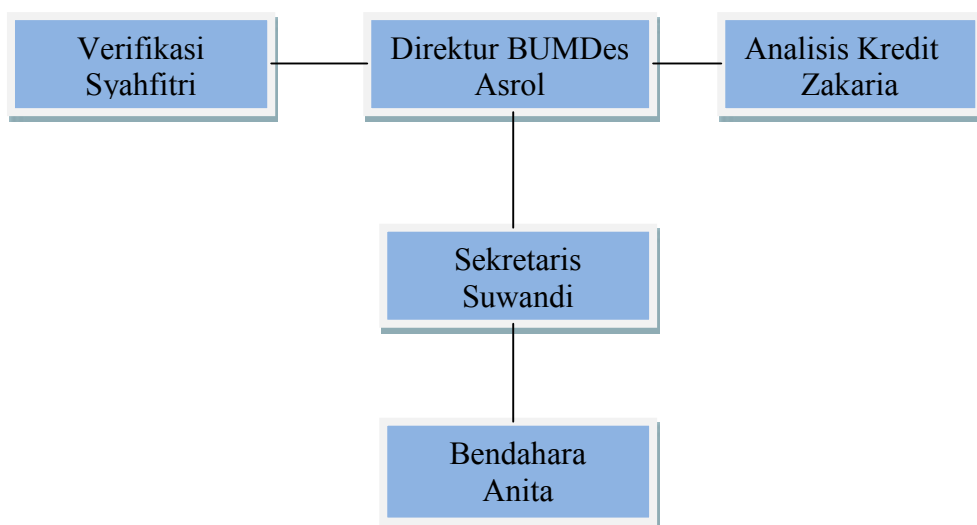
g. Peran Bendahara

- 1) Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes

- 2) Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUMDes
- 3) Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (cashflow) unit usaha BUMDes
- 4) Bertanggung jawab kepada Manajer Unit

Adapun susunan struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dapat dilihat sebagai berikut

**Gambar IV.1**  
**Struktur BUMDes Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh**  
**Kabupaten Siak**



*Sumber : Kantor BUMDes Rempak 2012*

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Identitas Responden**

Sebelum penulis membahas dan menganalisa lebih lanjut tentang Implementasi Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rempak, maka penulis terlebih dahulu memaparkan hasil penelitian dari beberapa identitas responden sebagai sampel yang diambil berdasarkan umur, jenis kelamin, suku, pendidikan, jenis Usaha, yaitu sebagai berikut:

##### **5.1.1 Keadaan Responden Berdasarkan Umur**

Secara teoritis faktor usia sangatlah berpengaruh dalam mengambil sebuah tindakan dalam memutuskan permasalahan. Dengan demikian dalam memutuskan suatu pilihan akan sangat berpengaruh, semakin tinggi usia maka tindakan yang diambil semakin baik karena tingkat kematangan emosional seseorang dalam berfikir. Selain pola fikir, tingkat usia juga berpengaruh kepada kekuatan atau stamina tubuh, sebab semakin tinggi usia maka semakin menurun stamina tubuh.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden berdasarkan umur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.1**  
**Keadaan Responden Berdasarkan Umur**

No	Tingkat Usia	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Kurang dari 25 Tahun	9	12,86 %
2.	Antara 26 Tahun – 30 Tahun	18	25,71 %
3.	Antara 31 Tahun – 35 Tahun	21	30 %
4.	Antara 36 Tahun – 40 Tahun	15	21,43 %
5.	Lebih dari 41 Tahun	7	10 %
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 9 orang (12,86%) responden, yang berusia 26 – 30 tahun sebanyak 18 orang (25,71%) responden dan yang berusia 31 – 35 tahun sebanyak 21 orang (30%) responden selanjutnya yang berusia 36 – 40 tahun sebanyak 15 orang (21,43%) responden sedangkan yang berusia 41 tahun keatas sebanyak 7 orang (10%) dari keseluruhan responden. Jadi, responden yang berusia 31 – 35 tahun yang terbanyak yaitu 21 orang (30%) responden. Dengan demikian terbukti bahwa usia antara 31 sampai dengan 35 dengan posisi terbanyak yaitu 21 orang (30%), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pola fikir antara usia ini sudah berpengaruh kepada pengambilan sebuah keputusan.

### 5.1.2 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden berdasarkan Jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.2**  
**Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Pria	43	61,43 %
2.	Wanita	27	38,57 %
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Dari tabel di atas berdasarkan jenis kelamin, jumlah Pria sebanyak 43 orang (61,43%) dan wanita sebanyak 27 orang (38,57%).

### 5.1.3 Keadaan Responden Berdasarkan Suku

Suku merupakan hal yang berpengaruh dalam kehidupan di masyarakat, bahkan suku juga mencerminkan watak serta tingkah-laku setiap individu. Oleh karena itu, suku merupakan faktor pendongkrak pola pikir untuk melakukan tindakan dalam lapisan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat angka responden berdasarkan suku, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.3**  
**Keadaan Responden Berdasarkan Suku**

No	Suku	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Ocu	36	51,43 %
2.	Jawa	10	14,28 %

3.	Melayu	23	32,86 %
4.	Batak	1	1,43 %
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Tabel di atas adalah hasil penelitian lapangan, membuktikan bahwa responden berdasarkan suku pemanfaat Usaha Simpan Pinjam pada BUMDes Desa Rempak ialah suku Ocu Yaitu sebanyak 36 orang atau 51,43% responden kemudian menyusul Suku Melayu sebanyak 23 orang atau 32,86% responden selanjutnya diikuti suku Jawa sebanyak 10 orang atau 14,28% responden sedangkan suku Batak menempati paling sedikit yaitu hanya 1 orang atau 1,43% dari keseluruhan responden. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pemanfaat Usaha Simpan Pinjam pada BUMDes Desa Rempak adalah suku Ocu dan Melayu sebab di Desa Rempak mayoritas penduduknya dari suku Ocu dan Melayu dan kemudian diikuti suku-suku lainnya.

#### **5.1.4 Keadaan Responden Berdasarkan Pendidikan**

Melalui pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkesinambungan akan membentuk serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan seseorang. Pendidikan yang pernah dijalani seseorang cenderung mempengaruhi kepribadian, kemampuan, wawasan dan pola pikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, daya pikir dan wawasan yang dimilikinya. Selanjutnya dalam uraian berikut ini penulis akan kemukakan keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.4**  
**Keadaan Responden Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentase (%)
2.	SD	11	15,71 %
3.	SMP/Sederajat	35	50 %
4.	SMA/Sederajat	20	28,57 %
5.	Sarjana	4	5,71 %
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa responden memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah SMP/Sederajat yaitu sebanyak 35 orang atau 50% dari jumlah keseluruhan responden. Selanjutnya diikuti responden yang memiliki jenjang pendidikan SMP/Sederajat berjumlah 20 orang atau 28,57 % responden dan jumlah responden yang berlatar belakang SD/Sederajat yaitu sebanyak 11 orang atau 15,71 % responden sedangkan jumlah responden yang paling sedikit yaitu responden yang berlatar belakang dari Sarjana sebanyak 4 orang atau 5,71 % dari keseluruhan responden penelitian. Dari data penelitian diatas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan responden tergolong kurang baik karena mayoritas responden memiliki pendidikan Tingkat SMP/Sederajat dan terbanyak kedua yaitu SMA/Sederajat, dengan demikian semakin baik tingkat

pendidikan responden, diharapkan jawaban-jawaban yang diberikan akan lebih rasional dan objektif terhadap penelitian ini.

#### 5.1.5 Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Usahnya

Pekerjaan merupakan sebagai kebutuhan bagi manusia karena dengan bekerja akan memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari, jenis pekerjaan seseorang juga menentukan tingkat kemapanan perekonomiannya. Dalam islam Rasulullah Saw. menyuruh kita untuk berbuat/bekerja untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama dan menyuruh kita untuk mencari akhirat seolah-olah kita akan mati esok. Dari dasar konsep itulah kita dapat pahami bahwa umat islam tidak hanya dibebankan untuk beribadah saja untuk akhirat akan tetapi dunia juga menjadi urusannya, yang pada intinya antara kedua hal tersebut dapat berjalan dengan seimbang sehingga tercipta kehidupan yang sejahterah dunia dan akhirat. selanjutnya mengetahui keadaan responden berdasarkan jenis pekerjaan/usahnya yang dijalankan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.5**

#### **Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan/Usahnya**

No	Jenis Pekerjaan/Usaha	Jumlah Orang	Persentase (%)
1.	Transportasi	2	2,86 %
2.	Perkebunan	32	45,71 %
3.	Perdagangan	29	41,43 %
4.	Perternakan	1	1,43 %



5.	Bengkel	2	2,86 %
6.	Idustri Kecil	4	5,71 %
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2012*

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jenis usaha-usaha yang dijalankan oleh pemanfaat usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya di Desa Rempak bermacam-macam usaha yang dilakoni, dilihat Mayoritas responden menjalankan usaha perkebunan yaitu sebanyak 32 orang atau 45,71% responden selanjutnya responden menjalankan usaha perdagangan sebanyak 29 orang atau 41,43% responden, diikuti responden menjalankan usaha industri kecil sebanyak 4 orang atau 5,71% dan responden yang menjalankan usaha transportasi dan bengkel hanya 4 responden sedangkan responden yang hanya menjalankan usaha peternakan 1 orang atau 1,43 dari keseluruhan responden. Dari data jenis pekerjaan/usaha responden di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden meminjam dana usaha simpan pinjam untuk usaha perkebunan dan perdagangan. Hal ini disebabkan karena mata pekerjaan mayoritas masyarakat Desa Rempak yaitu menjadi petani/pekebun dan pedagang.

## **5.2 Analisis Indikator Variabel Penelitian Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak**

Adapun aspek-aspek yang menjadi indikator untuk mengetahui Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak yaitu

mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

BUMDes “REMPAK MAJU JAYA” di Desa Rempak meliputi:

1. Ketentuan dan Prosedur Peminjaman
  - h. Ketentuan pinjaman ditetapkan oleh direksi BUMDes
  - i. Pemberian pinjaman berdasarkan skala prioritas
  - j. Diutamakan warga Desa Rempak yang berdomisili minimal 3 tahun dengan dibuktikan oleh KTP dan KK
  - k. Pinjaman maksimal Rp.25 juta lebih dari itu diatur dalam BUMDes
  - l. Usia pemanfaat minimal 20 tahun/sudah berkeluarga maksimal usia produktif
  - m. Membuat proposal sesuai dengan format dan dinilai oleh direksi dengan melakukan verifikasi di lapangan
  - n. Bersedia menerima sanksi dan menanggung biaya administrasi
2. Mekanisme dan Suku Bunga
  - d. Proposal dari pemanfaat yang masuk dicatat dalam buku antrian dan kemudian diverifikasi oleh direksi menurut urutan
  - e. Pengambilan pinjaman sesuai dengan surat perjanjian (SP2K) dan apabila telah jatuh tempo harus membayar denda
  - f. Pemanfaat yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya
3. Agunan dan suku bunga
  - e. Agunan harus asli dan agunan tersebut dinilai dan ditetapkan oleh direksi
  - f. Keamanan agunan menjadi tanggung jawab direksi dengan membuat daftar inventaris
  - g. Suku bunga BUMDes sebesar 18%/tahun atau 1.5%/bulan
  - h. Suku bunga dan lama waktu pinjaman yang lebih dari 25 juta ditentukan melalui berita acara
4. Sanksi-Sanksi
  - d. Sanksi bagi anggota dan pengurus BUMDes
  - e. Sanksi khusus bagi pemanfaat
  - f. Sanksi bagi pengurus

Adapun hasil penelitian penulis mengenai Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak berdasarkan sub variabel yaitu:

### **5.2.1 Ketentuan dan Prosedur Peminjaman**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang didirikan oleh Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Siak (Lembaran daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 18) Tambahan lembaran Nomor 12 Tahun 2007 dan hasil musyawarah Desa Rempak yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 2010 bertempat di Aula Balai Desa Rempak untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan aturan dan hasil kesepakatan di atas maka terbentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak dengan nama “ BUMDes Rempak Maju Jaya”. Kemudian untuk menjalankan BUMDes diatas maka dilakukan musyawarah Desa dengan membentuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Rempak Maju Jaya Desa Rempak yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan BUMDes tersebut. Didalam AD/ART diatas diatur mengenai ketentuan dan prosedur peminjaman. Ketentuan peminjaman adalah suatu aturan yang harus dipenuhi oleh pemanfaat dan pengelola BUMDes yaitu meliputi:

1. Ketentuan pinjaman ditetapkan oleh direksi BUMDes dengan Memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Karakter/sifat perilaku bagi calon pemanfaat BUMDes;
  - b. Calon pemanfaat harus mempunyai agunan yang bernilai ekonomis;

- c. Harus melihat keadaan atau kemampuan calon pemanfaat dalam membayar dan atau usaha yang akan dilakukannya;
- d. Keadaan keuangan BUMDes;
- e. Saran dan pendapat Komisaris dan pengawas;
- f. Ditetapkan berdasarkan urutan antrian dan skala prioritas.

2. Pemberian pinjaman berdasarkan skala prioritas

- a. Masyarakat Desa Rempak yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
- b. Masyarakat yang bukan warga desa yang telah berdomisili selama 5 tahun dan memiliki usaha serta mempunyai agunan yang memenuhi syarat;
- c. Warga desa lain yang mendapat rekomendasi Komisaris, Direksi atau Pengawas BUMDes.

3. Skema kredit yang dilaksanakan adalah:

- a. Usulan kredit harus ditandatangani oleh calon pemanfaat;
- b. Pinjaman tidak boleh dipindah tangankan;
- c. Usulan kredit harus diverifikasi oleh Direksi;
- d. Kredit disetujui oleh direksi dan diketahui komisaris;
- e. Pinjaman maksimal Rp. 25.000.000,- jangka waktu maksimal 2 tahun;
- f. Pinjaman lebih dari Rp. 25.000.000.- menggunakan perjanjian khusus dituangkan dalam berita acara dengan jangka waktu 6 bulan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dibuat untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan BUMDes Rempak Maju Jaya sehingga dalam pengelolaannya mudah dan terkoordinir sesuai dengan aturan tersebut.

Sehingga diharapkan dapat berperan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Rempak.

Sedangkan prosedur merupakan susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya. dalam hal ini BUMDes Rempak Maju Jaya mempunyai prosedur-prosedur sesuai didalam AD/ART sebagaimana terdapat pada Pasal 8 yaitu sebagai berikut:

1. Diutamakan warga Desa Rempak yang telah berdomisili 3 tahun dengan dibuktikan mempunyai KTP dan KK;
2. Pinjaman secara perorangan atau kelompok;
3. Peminjam maksimal Rp. 25 juta (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), lama angsuran selama 2 tahun (Dua Tahun);
4. Peminjaman lebih dari 25 juta dapat diberikan dengan perjanjian menggunakan berita acara;
5. Aturan-aturan peminjaman lebih dari 25 juta tercantum dalam aturan khusus BUMDes;
6. Usia pemanfaat minimal 20 tahun atau sudah berkeluarga maksimal usia produktif;
7. Tercatat sebagai anggota BUMDes, dengan membayar simpanan pokok Rp. 50.000,-
8. Membuat proposal sesuai format yang telah ditentukan;
9. Dinilai oleh direksi dengan melakukan verifikasi lapangan;
10. Memiliki agunan/jaminan surat berharga;

11. Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan bila melanggar aturan;
12. Bersedia menanggung biaya administrasi yang diakibatkan dari peminjaman.

Prosedur-prosedur pinjaman usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya harus diimplementasikan dengan secara konsisten dan secara profesional sehingga tujuan BUMDes dapat terwujud. Kemudian, dibawah ini akan disajikan hasil penelitian penulis mengenai ketentuan dan prosedur peminjaman BUMDes Rempak Maju Jaya berdasarkan sub indikatornya yaitu:

**a. Ketentuan pinjaman ditetapkan oleh direksi BUMDes**

Ketentuan pinjaman ditetapkan oleh direksi BUMDes maksudnya adalah maka aturan pinjaman pada BUMDes Rempak Maju Jaya di tetapkan oleh Direksi BUMDes dengan memandang berbagai macam hal diantaranya, melihat karakter/sifat perilaku sipermanfaat, melihat besarnya nilai agunannya, kemampuan membayar, juga memperhatikan keadaan keuangan BUMDes serta menerima saran, pendapat Komisaris serta pengawas dan berdasarkan nomor antrian dengan memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh BUMDes Rempak Maju Jaya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diharapkan BUMDes Rempak Maju Jaya dapat berjalan dengan baik dan tumbuh berkembang sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat Desa tersebut. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Implementasi Usaha Simpan

Pinjam Pada BUMDes Desa Rempak dengan menggunakan ketentuan dan prosedur peminjaman dengan sub indikator ketentuan pinjaman ditetapkan oleh Direksi BUMDes dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.6**  
**Jawaban Responden Mengenai Ketentuan Pinjaman ditetapkan oleh**  
**Direksi BUMDes dengan Impementasinya**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	27	38.57 %
2	Cukup Sesuai	25	35.71 %
3	Kurang Sesuai	18	25,71 %
4	Tidak Sesuai	-	
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan dalam ketentuan pinjaman ditentukan oleh Direksi BUMDes , yaitu sebanyak 27 orang atau 38.57% responden. Selanjutnya diikuti oleh responden yang menjawab Cukup Sesuai yaitu sebanyak 25 orang atau 35.71% responden dan yang menjawab Kurang Sesuai sebanyak 18 orang atau 25,71% responden sedangkan tidak ada yang memilih jawaban Tidak Sesuai. Dari data penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan pinjaman yang ditentukan oleh Direksi BUMDes sudah sesuai karna 70 responden 27 orang yang menyatakan baik.

#### **b. Pemberian pinjaman berdasarkan skala prioritas**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Desa Rempak untuk membantu masyarakat mendapatkan modal usaha dengan adanya badan tersebut diharapkan mendongkrak pendapatan masyarakat karna BUMDes di Desa Rempak mengelola Usaha Simpan Pinjam sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dalam hal pemberian pinjaman dana ekonomi Desa tersebut diatur dalam AD/ART dimana mempunyai skala prioritas yaitu, Masyarakat Desa Rempak yang dibuktikan dengan KTP dan KK, artinya dalam pemberian dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya memprioritaskan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa tersebut dengan dibuktikan KTP/KK dan ketika dalam daftar usulan peminjaman prioritas pertama di atas telah terpenuhi maka selanjutnya daftar usulan masyarakat yang bukan warga desa akan tetapi telah berdomisili 5 tahun di desa tersebut dan memiliki usaha serta agunan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila prioritas di atas telah terpenuhi dan keuangan BUMDes masih ada maka warga desa lain dapat mengajukan pinjaman akan tetapi telah mendapat rekomendasi baik itu dari Komisaris, Direksi atau pengawas BUMDes.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes Desa Rempak dengan menggunakan ketentuan dan prosedur peminjaman dengan sub indikator Pemberian pinjaman berdasarkan skala prioritas dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.7**  
**Jawaban Responden Mengenai Pemberian Pinjaman Berdasarkan**



### Skala Prioritas

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	32	45.71 %
2	Cukup Sesuai	28	40 %
3	Kurang Sesuai	10	14.29 %
4	Tidak Sesuai	-	-
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui mayoritas responden mengatakan bahwa dalam pemberian pinjaman dengan berdasarkan skala prioritas dimana kategori responden menjawab Sesuai yaitu sebanyak 32 orang atau 45,71% responden, selanjutnya diikuti dengan yang menjawab Cukup Sesuai sebanyak 28 orang atau 40% responden dan responden yang menjawab Kurang Sesuai sebanyak 10 orang atau 14.29% dari keseluruhan responden.

Dari hasil responden penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengatakan dalam pemberian pinjaman berdasarkan skala prioritas sudah sesuai dengan aplikasinya hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Direktur BUMDes yaitu dengan (Bapak Azrol) beliau mengatakan:

*“ kita memberikan pinjaman berdasarkan ketentuan AD/ART dengan skala prioritas masyarakat Desa Rempak. Kita prioritaskan warga kita agar tidak ada lagi masyarakat miskin”* (Wawancara, Senin 17 Desember 2012 Pukul 10:00 Wib)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes telah memprioritaskan pinjaman usaha simpan pinjam tersebut kepada masyarakat Desa setempat.

- c. **Diutamakan warga Desa Rempak yang berdomisili minimal 3 tahun dengan dibuktikan oleh KTP dan KK**

Warga Desa Rempak yang telah berdomisili minimal 3 tahun dengan dibuktikan adanya KTP/KK merupakan prioritas utama untuk menjadi pemanfaat usaha simpan pinjam yang dikelola BUMDes Rempak Maju Jaya sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes Desa Rempak dengan menggunakan ketentuan dan prosedur peminjaman dengan sub indikator warga Desa rempak yang berdomisili minimal 3 tahun dengan dibuktikan oleh KTP/KK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.8**  
**Jawaban Responden Mengenai Prosedur Pinjaman telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu mengutamakan warga Desa Rempak yang berdomisili minimal 3 tahun dengan dibuktikan oleh KTP dan KK**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	20	28,57 %
2	Cukup Sesuai	35	50 %
3	Kurang Sesuai	9	12,86 %
4	Tidak Sesuai	6	8,57 %
Jumlah		<b>70</b>	<b>100 %</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden menanggapi pertanyaan Prosedur Pinjaman telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu mengutamakan warga Desa Rempak yang berdomisili minimal 3 tahun dengan dibuktikan oleh KTP dan KK yang menjawab Cukup Sesuai yaitu sebanyak 35 orang atau 50% responden kemudian diikuti responden yang menjawab Sesuai yaitu sebanyak 20 orang atau 28,57% responden dan responden yang menjawab Kurang Sesuai yaitu

sebanyak 9 orang atau 12,86% responden sedangkan yang paling sedikit yaitu responden yang menjawab Tidak Sesuai yaitu sebanyak 6 orang atau 8,57% dari jumlah keseluruhan responden.

Jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pinjaman dengan skala prioritas masyarakat setempat dengan ketentuan sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada sebagian responden yang menanggapi kurang sesuai tetapi relatif kecil.

**d. Pinjaman maksimal Rp. 25 juta lebih dari itu diatur dalam BUMDes**

Mekanisme pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rempak Maju Jaya telah diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Sedangkan berkenaan pinjaman yang diatas 25 juta tidak sama aturan peminjamannya dengan dibawah 25 karna pemanfaat yang mengajukan pinjaman diatas 25 juta diatur dengan menggunakan berita acara peminjaman karena skala pinjamannya dikategorikan cukup besar. Dengan dibuatkannya berita acara peminjaman supaya kewaspadaan serta tanggung jawab bagi pemanfaat dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mengetahui tanggapan responden dengan sub indikator pinjaman maskimal Rp. 25 juta lebih dari itu diatur dalam BUMDes dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.9**  
**Jawaban Responden Mengenai Apakah Sudah Sesuai Ketika Pemanfaat Meminjam Lebih Dari 25 Juta dengan Perjanjian Menggunakan Berita Acara**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	30	42,86 %

2	Cukup Sesuai	26	37,14 %
3	Kurang Sesuai	10	14,29 %
4	Tidak Sesuai	4	5,71 %
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel hasil penelitian di atas, menyatakan bahwa jawaban responden mengenai pinjaman yang lebih dari 25 juta menggunakan berita acara hasil penelitian menyebutkan jawaban terbanyak responden menjawab Sesuai sebanyak 30 orang atau 42,86% diikuti dengan responden menjawab Cukup Sesuai sebanyak 26 orang atau 37,14% dan selanjutnya jawaban responden menjawab Kurang Sesuai yaitu 10 orang atau 14,29% sedangkan responden yang memberikan jawabannya tidak sesuai 4 orang atau 5,71% dari jumlah keseluruhan responden. jawaban penelitian terbanyak membuktikan prosedur peminjaman yang lebih dari 25 juta telah dijalankan dengan baik. Hal ini pun sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan sekretaris BUMDes Bapak Suwandi beliau mengatakan:

*“ kita membuat surat perjanjian atau berita acara bagi pemanfaat yang meminjam lebih dari 25 juta sesuai aturan pada BUMDes”*  
(Wawancara Selasa, 18 Desember 2012 Pukul 09:10 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan peminjam diatas 25 juta pengelola BUMDes membuat perjanjian dengan peminjam/pemanfaat sesuai aturan yang telah ditentukan dalam BUMDes. Sedangkan dari jawaban responden mengenai peminjaman yang lebih 25 juta harus membuat berita acara di atas terdapat 4 orang atau 5,71 % yang menyatakan Tidak Sesuai.

**e. Prosedur peminjam usia minimal 20 tahun/sudah berkeluarga maksimal usia produktif**

Dalam prosedur pinjaman usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya di Desa Rempak salah satu syaratnya calon peminjam/pemanfaat usia minimal 20 tahun atau sudah berkeluarga maksimal masih dalam usia produktif dalam artian masih kuat/mampu bekerja sehingga dana yang dipinjam dapat dipergunakan sesuai kegiatan/usaha yang telah direncanakan dalam proposal pengajuan pinjaman tersebut. Tujuan batasan umur dijadikan syarat dalam prosedur peminjaman usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya adalah karena usia dibawah 20 tahun kebawah merupakan umur dalam masa pencarian jati diri artinya usia saat itu belum matang atau belum stabil sehingga tanggung jawab serta objektivitas dalam mengambil keputusan belum maksimal. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Rempak yaitu dengan Bapak Anwar beliau mengatakan:

*“Batasan usia kita jadikan sebagai syarat sebagai peminjam usaha simpan pinjam karena usia yang dibawah 20 masih sangat muda takutnya nanti dana yang diberikan disalah gunakan sehingga tidak membayar ansuran sehingga terjadi penunggakan/masalah lainnya”*  
(Wawancara, Rabu 19 Desember 2012 Pukul 14:00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor usia dijadikan sebagai prosedur dalam usaha simpan pinjam karena faktor usia menentukan tingkat kemampuan rasa tanggungjawab peminjam. Untuk mengetahui tanggapan responden dengan sub indikator Prosedur peminjam usia minimal 20 tahun/sudah berkeluarga maksimal usia produktif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.10**  
**Jawaban Responden Mengenai Terdapat Peminjam yang Berumur dibawah 20 Tahun atau Belum Menikah**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	30	42,86 %
2	Sering	23	32.86 %
3	Kadang-Kadang	13	18.57 %
4	Tidak Pernah	4	5.71 %
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan 2012*

Dari tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Selalu sebanyak 30 orang atau 42.86% diikuti dengan responden yang menjawab Sering sebanyak 23 orang atau 32.86% Responden dan selanjutnya jawaban responden menjawab Kadang-Kadang yaitu 13 orang atau 18.57% responden sedangkan responden yang memberikan jawabannya Tidak Pernah 4 orang atau 5,71% responden dari jumlah keseluruhan responden. Berdasarkan data penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaat usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya masih terdapat pada usia 20 tahun kebawah dalam artian pengurus BUMDes memberikan pinjaman di usia tersebut sedangkan dalam prosedur pinjaman tidak dibenarkan, Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Sugianto beliau mengatakan:

*“saya jadi pemanfaat/peminjam dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya untuk usaha cucian motor, umur saya masih 18 tahun dan lainnya juga ada seumuran dengan saya”*  
(Wawancara, Senin 17 Desember Pukul 15:00 Wib)

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota pemanfaat usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya masih terdapat usia 20 tahun kebawah yaitu usia 18 tahun yang tidak sesuai dengan prosedur peminjaman yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Sebab pada Pasal 18 disebutkan bahwa prosedur peminjaman usia pemanfaat minimal 20 tahun atau sudah berkeluarga maksimal usia produktif. Artinya pengurus BUMDes telah melanggar Pasal 18 di atas, akan tetapi pengurus BUMDes mempunyai pertimbangan dalam memberikan pinjaman kepada pemanfaat, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ketua Direktur BUMDes dengan Bapak Azrol beliau mengatakan:

*“ Ya, memang betul kita ada memberikan pinjaman kepada pemanfaat yang usianya belum cukup 20 tahun/tidak sesuai dengan ART. Akan tetapi kita lihat potensi usaha yang akan dijalankan cukup baik serta strategis, karena cucian motor di tempat itu belum ada sedangkan anak itu punya kemampuan di bidang itu”* ( Wawancara, Senin 17 Desember Pukul 11.00)

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pengurus BUMDes memberikan pinjaman kepada pemanfaat yang usianya masih 20 tahun kebawah, karena melihat potensi usaha yang akan di jalankan mempunyai prospek yang bagus serta kemampuan pemanfaat dalam cucian motor, artinya jika usaha pemanfaat akan lancar atau berkembang secara otomatis kemampuan pengembalian dana pinjaman tersebut juga akan lancar atau tidak menunggak. Pertimbangan pengurus BUMDes di atas sudah objektif akan tetapi, Anggaran Rumah Tangga (ART) dilanggar artinya kalau memang kebijakan seperti itu aturan usaha simpan pinjam mengenai prusedur peminjaman lebih baik dilakukan revisi.

**f. Membuat proposal sesuai dengan format dan dinilai oleh direksi dengan melakukan verifikasi di lapangan**

Salah satu syarat untuk melakukan pinjaman usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya adalah membuat proposal jenis usaha yang

akan didanai dari pinjaman tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya proposal tersebut diajukan oleh calon pemanfaat usaha simpan pinjam dan kemudian Direksi BUMDes melakukan verifikasi di lapangan untuk menentukan proposal yang layak diberikan bantuan pinjaman dana usaha simpan pinjam sesuai aturan. Untuk mengetahui tanggapan responden penelitian Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh dengan sub indikator membuat proposal sesuai dengan format dan dinilai oleh direksi dengan melakukan verifikasi dilapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.11**  
**Tanggapan Responden Mengenai Membuat Proposal Sesuai Dengan**  
**Format Dan Dinilai Oleh Direksi Dengan Melakukan Verifikasi**  
**Dilapangan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	12	17,14 %
2	Cukup Sesuai	18	25,71 %
3	Kurang Sesuai	30	42,86 %
4	Tidak Sesuai	10	14,29 %
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan 2012*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jawaban responden yang menjawab paling sedikit yaitu Tidak Sesuai sebanyak 10 orang atau 14,29% responden diikuti yang menjawab Sesuai berjumlah 12 orang atau 17,14% responden dan selanjutnya responden yang menjawab Cukup Sesuai sebanyak 18 orang atau 25,71% responden sedangkan responden yang memberikan jawaban terbanyak yaitu Kurang Sesuai sebanyak 30 orang atau 42,86% dari keseluruhan responden penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa proposal yang dibuat kemudian diverifikasi oleh Direksi belum sesuai dengan



implementasinya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan tim verifikasi BUMDes dengan Bapak Ridwan beliau mengatakan:

*“Masalah proposal yang diajukan oleh calon pemanfaat sebagian tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan/asal-asalan dan juga keterangan yang muat dalam proposal dengan fakta di lapangan tidak sesuai”* (Wawancara, Senin 17 Desember 2012 Pukul 09:20 Wib)

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat pemanfaat yang mengajukan proposal peminjaman, apa yang dibuat dalam proposalnya dengan fakta dilapangan tidak sesuai sehingga tim verifikasi BUMDes tidak dapat meloloskan sebagai pemanfaat dan memberikan dana pinjaman tersebut.

**g. Pemanfaat Bersedia menerima sanksi dan biaya administrasi**

Dalam Pasal 18 ayat 11 dan 12 Anggaran Rumah Tangga (ART) disebutkan bahwa peminjam bersedia menerima sanksi yang ditentukan bila melanggar aturan dan bersedia menanggung biaya administrasi yang dibutuhkan selama proses administrasi peminjaman selesai. segala aturan-aturan yang terdapat pada BUMDes Rempak Maju Jaya harus dijalankan baik bagi pengurus maupun bagi pemanfaat supaya BUMDes tersebut dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan dari Anggaran Rumah Tangga (ART) di atas bahwa pemanfaat bersedia menerima sanksi-sanksi yang diberikan oleh pengurus BUMDes ketika melanggar segala aturan-aturan yang telah ditentukan. Besar kecilnya sanksi yang diberikan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan dan juga pemanfaat bersedia menanggung segala biaya yang dibutuhkan selama proses administrasi (peminjaman) berlangsung. Untuk mengetahui tanggapan responden dengan sub indikator

pemanfaat bersedia menerima sanksi dan menanggung biaya administrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.12**  
**Jawaban Responden Mengenai Pemanfaat Bersedia Menerima Sanksi**  
**Serta Menanggung Biaya Administrasi**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	31	44,29 %
2	Cukup Sesuai	26	37,14 %
3	Kurang Sesuai	13	18,57 %
4	Tidak Sesuai	-	-
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan 2012*

Dari tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Sesuai sebanyak 31 orang atau 44,29% diikuti dengan responden yang menjawab Cukup Sesuai sebanyak 26 orang atau 37,14% Responden dan selanjutnya jawaban responden menjawab Kurang Sesuai yaitu 13 orang atau 18,57% keseluruhan responden. Dari hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaat bersedia menerima sanksi serta menanggung biaya yang dikeluarkan selama proses administrasi berlangsung. Hal sejalan dengan hasil wawancara penulis salah satu pemanfaat dengan (Ibu Aminah) beliau mengatakan:

*“Kita siap kok menanggung sanksi yang diberikan pengurus BUMDes jika kita melakukan kesalahan dan biaya administrasi itu kita tanggung sendiri”* (Wawancara, Selasa 18 Desember 2012 Pukul 16:00 Wib).

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa kesediaan pemanfaat menanggung sanksi serta biaya proses administrasi berlangsung. Adapun sanksinya diatur pada Pasal 12 AD/ART menyatakan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi pemanfaat yang menunggak dikenakan denda sesuai aturan yang Direksi;
- b. Pemanfaat yang menunggak diberikan teguran,apabilasampai 3 bulan menunggak pada bulan ke 4, akan dipanggil oleh Kepala Desa;
- c. Apabila pemanggilan tidak mendapat tanggapan agunan akan dilelang;
- d. Seluruh biaya yang timbul akibat proses penarikan atau pelelangan ditanggung oleh pemanfaat;
- e. Bagi pemanfaat yang terbukti memberikan pernyataan tidak benar akan dilaporkan kepada pihak berwajib dan aka diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebab aturan BUMDes dibuat atas dasar musyawarah perangkat desa dan BPD atas dasar kepentingan bersama untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan modal usaha masalah adanya sanksi merupakan ancaman bagi yang tidak memenuhi aturan dan masalah biaya administrasi itulah proses yang harus dipenuhi dan ditanggung.

Selanjutnya untuk mengetahui reskapitulasi tanggapan responden dari variabel ketentuan dan prosedur peminjaman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.13**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Ketentuan dan Prosedur Peminjaman**

No	S		CS		KS		TS		N	%
	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	27	38.57	25	35.71	18	25.71			70	100

2	32	45,71	28	40	10	14,29			70	100
3	20	28,57	35	50	9	12,86	6	8,57	70	100
4	30	42,86	26	37,14	10	14,28	4	5,71	70	100
5	30	42,86	23	32,86	13	18,57	4	5,71	70	100
6	12	17,14	18	25,71	30	42,86	10	14,29	70	100
7	31	44,29	26	37,14	13	18,57			70	100
<b>Jumlah</b>	<b>182</b>	<b>37,14</b>	<b>181</b>	<b>36,94</b>	<b>103</b>	<b>21,02</b>	<b>24</b>	<b>4,90</b>	<b>490</b>	<b>100</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Keterangan tabel :

S : Sesuai

CS : Cukup Sesuai

KS : Kurang Sesuai

TS : Tidak Sesuai

Dari tabel rekapitulasi jawaban responden di atas mengenai Implementasi Usaha Simpan Pinjam Desa Pada BUMDes di Desa Rempak dengan menggunakan variabel ketentuan dan prosedur peminjaman, mayoritas responden menyatakan Sesuai yaitu sebanyak 182 orang atau 37,14% responden selanjutnya diikuti responden yang memberikan jawaban Cukup Sesuai sebanyak 181 orang atau 36,94% responden dan responden yang menjawab Kurang Sesuai yaitu sebanyak 103 orang atau 21,02 % responden sedangkan responden yang memberikan paling sedikit yaitu Tidak Sesuai sebanyak 24 orang atau 4,90% dari keseluruhan responden. Berdasarkan data penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pelaksanaan ketentuan dan prosedur peminjaman pada BUMDes Rempak Maju Jaya sudah sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes tersebut.

### 5.2.2. Mekanisme Pencairan dan Pengembalian

Mekanisme pencairan dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang terdapat pada Pasal 10 menyebutkan sebagai berikut:

1. Proposal dari pemanfaat yang masuk dicatat dalam buku antrian pemanfaat;
2. Dilakukan verifikasi lapangan oleh Direksi menurut urutan;
3. Pemanfaat yang memenuhi syarat menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) dengan Direksi dan diketahui oleh pengawas dan komisaris;
4. Direksi membuat Surat Pencairan Dana (SPD) yang diketahui komisaris dan akan dipergunakan untuk pencairan ke Bank;
5. Penyaluran dana BUMDes sesuai dengan kebutuhan (SPD).

Sedangkan untuk mekanisme pengembalian diatur pada Pasal 11 AD/ART menyebutkan sebagai berikut:

1. Pemanfaat harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K);
2. Pengembalian yang lewat jatuh tempo harus membayar denda harian sesuai aturan BUMDes;
3. Pemanfaat yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya dengan ketentuan dan proses verifikasi seperti semula.

Mekanisme peminjaman dan pengembalian di atas merupakan proses dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemanfaat pada BUMDes Rempak Maju Jaya yang telah disepakati pada musyawarah pembentukan

BUMDes tersebut yang terdapat dalam Anggara Rumah Tangga (ART). Selanjutnya untuk mengetahui Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh dengan menggunakan variabel mekanisme pencairan dan pengembalian dana yaitu sebagai berikut:

**a. Proposal dari pemanfaat yang masuk dicatat dalam buku antrian dan diverifikasi oleh direksi menurut urutan**

Dalam mekanisme peminjaman dikatakan bahwa proposal calon peminjam/pemanfaat yang masuk kepada BUMDes Rempak Jaya dilakukan pencatatan dalam daftar tunggu. kemudian berdasarkan antrian daftar tunggu tersebut menurut urutannya, maka Direksi BUMDes melakukan verifikasi lapangan atas kelayakan proposal usaha yang layak diberikan dana pinjaman modal. Dengan adanya mekanisme diatas diharapkan tidak adanya deskriminasi dalam artian pengurus BUMDes harus profesional dalam menjalankan tugasnya bahwa proposal yang duluan masuk maka itulah yang pertama dilakukan verifikasi/uji kelayakan. Untuk mengetahui tanggapan responden dengan pertanyaan proposal dari pemanfaat yang masuk dicatat dalam buku antrian dan diverifikasi oleh Direksi menurut urutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.14**  
**Jawaban Responden Mengenai Apakah Proposal Dari Pemanfaat yang**  
**Masuk Dicatat Dalam Buku Antrian dan Diverifikasi oleh Direksi**  
**Menurut Urutan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	13	18,57%
2	Cukup Sesuai	24	34,29 %
3	Kurang Sesuai	29	41,43 %
4	Tidak Sesuai	4	5,71 %
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan 2012*

Dari tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Kurang Sesuai sebanyak 29 orang atau 41.43% diikuti dengan responden yang menjawab Cukup Sesuai sebanyak 24 orang atau 34.29% Responden dan selanjutnya jawaban responden menjawab Sesuai yaitu 13 orang atau 18.57% responden sedangkan responden yang memberikan jawabannya Tidak Sesuai 4 orang atau 5,71 % responden dari jumlah keseluruhan responden.

Dari data angket penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme peminjaman belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dari jawaban responden 29 orang 41,43% yang memberikan jawaban Kurang Sesuai dan juga diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan pemanfaat yaitu (Bapak Rusli Halil) beliau mengatakan:

*“ kalau bapak lihat pengurus BUMDes Rempak Maju Jaya tak profesional karna Bapak duluan kemarin yang mengajukan proposal tapi paling terakhir dilakukan verifikasi”* (Wawancara Selasa 18 Desember 2012 Pukul 14:25 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa profesional pengurus dalam melakukan verifikasi sesuai dengan daftar urutan pengajuan permohonan proposal dana usaha ekonomi desa.

**b. Pengembalian pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) dan apabila jatuh tempo harus membayar denda**

Mekanisme pengembalian pinjaman usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes. Dikatakan bahwa dalam pengembalian pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian (SP2K) yang telah disepakati dan juga diatur apabila pinjaman telah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar Rp.5000,- perhari dimaksudkan dengan adanya denda yang diterapkan supaya pemanfaat tidak akan melakukan penunggakan pengembalian karna adanya beban yang diberikan. Untuk mengetahui Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes di Desa Rempak dengan sub indikator Pengembalian pinjaman sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) dan apabila jatuh tempo harus membayar denda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.15**  
**Jawaban Responden Mengenai Apakah sudah Sesuai Apabila**  
**Pengembalian Pinjaman yang Lewat Jatuh Tempo dikenakan Denda**  
**Sesuai Ketentuan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	28	40 %
2	Cukup Sesuai	23	32,86 %
3	Kurang Sesuai	18	25,71 %
4	Tidak Sesuai	1	1,43 %
Jumlah		<b>70</b>	<b>100 %</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Sesuai sebanyak 28 orang atau 40% diikuti dengan responden yang menjawab Cukup Sesuai sebanyak 23 orang atau 32,86% Responden dan selanjutnya jawaban responden menjawab Kurang Sesuai yaitu 18 orang atau 25,71% responden sedangkan responden yang memberikan jawabannya



Tidak Sesuai 1 orang atau 1,43 % responden dari jumlah keseluruhan responden. Dari hasil data angket penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan pemberian denda sudah berjalan dengan baik, hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Bendahara BUMDes yaitu (Ibu Anita) beliau mengatakan:

*“ kita memberikan denda bagi pemanfaat yang menunggak pembayarannya sesuai aturan yang sudah ditetapkan tapi meski ada pemanfaat yang minta keringanan denda kita juga tanggapi tapi kita lihat dulu apa alasannya kok bisa menunggak”* (Wawancara, Senin 17 Desember 2012 Pukul 14: 05 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat pada BUMDes Rempak Maju Jaya telah diterapkan dengan baik dan juga pengurus memberikan keringanan kepada pemanfaat yang menunggak dengan alasan yang bisa diterima. Sebab fungsi didirikan BUMDes salah satunya adalah untuk membantu masyarakat miskin, sebagaimana terdapat pada Pasal 7 AD/ART menyatakan sebagai berikut:

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada;
- b. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi Desa dan mengurangi pengangguran;
- d. Membantu Pemerintah Desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di Desanya;
- e. Memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat Desa.

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan pihak pemanfaat mengenai permasalahan penunggakan yang mereka lakukan ada beberapa faktor yang terjadi, berikut pernyataan (Bapak Wahidin) yaitu:

*“ Kita sebagai pemanfaat tidak mau juga melakukan penunggakan cicilan kita tapi, apa boleh buat, sekarang harga sawit turun, Karet sedangkan harga barang pokok tak ada turun-turun mala naik”*  
(Wawancara 21 Desember Pukul 15:00 Wib)

Wawancara di atas cukup menjadi bahan acuan bahwa terjadinya penunggakan dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya karena kondisi perekonomian petani tidak stabilnya harga hasil perkebunan (sawit dan karet) tidak menentu dan harga barang pokok lainnya yang semakin naik sedangkan dari jumlah terbesar pemanfaat dana usaha tersebut dipergunakan untuk pengembangan pertanian atau perkebunan dibandingkan sector-sektor lainnya. Hasil wawancara penulis dengan Direktur BUMDes tentang masalah penunggakan yaitu (Bapak Asrol) beliau mengatakan bahwa:

*“penunggakan itu terjadi karena sebagian pemanfaat menyalagunakan pinjaman yang diberikan BUMDes yang seharusnya dana pinjaman untuk mengembangkan usahanya tetapi digunakan untuk keperluan yang lainnya sehingga tidak dapat membayar angsuran tersebut”*  
(Wawancara, Senin 17 Desember 2012 Pukul 09: 45 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya penunggakan dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya karena pemanfaat menyalahgunakan pinjaman yang diberikan oleh BUMDes yang seharusnya menjadi modal usaha tetapi digunakan untuk keperluan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga mereka tidak dapat membayar angsuran.

**c. Pemanfaat yang telah melunasi pinjaman dapat mengajukan pinjaman berikutnya**

Dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya merupakan dana bantuan modal usaha yang ditujukan untuk pengembangan usaha dagang, perkebunan, bengkel dan lain-lainnya. dalam mekanisme pengembalian dikatakan bahwa bagi pemanfaat yang telah melunasi/habis masa kreditnya maka diperbolehkan untuk mengajukan peminjaman berikutnya dengan proses yang sama ketika melakukan peminjaman pertama kalinya. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai permasalahan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.16**  
**Jawaban Responden Mengenai Pemanfaat yang Melunasi Pinjaman dan Dapat Mengajukan Pinjaman Berikutnya Sudah Terlaksana dengan Baik**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	22	31.43 %
2	Cukup Sesuai	34	48.57 %
3	Kurang Sesuai	11	15,71 %
4	Tidak Sesuai	3	4.29%
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Cukup Sesuai sebanyak 34 orang atau 48,57% diikuti dengan responden yang menjawab Sesuai sebanyak 22 orang atau 31,43% Responden dan selanjutnya jawaban responden menjawab Kurang Sesuai yaitu 11 orang atau 15,71% responden sedangkan responden yang memberikan jawabannya Tidak Sesuai 3 orang atau 4.29 % responden dari jumlah keseluruhan responden. Dari hasil penelitian di atas menyatakan bahwa peminjam yang melakukan pinjaman kembali kepada BUMDes telah berjalan dengan baik,

hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan Sekertaris BUMDes dengan (Bapak Suwandi) beliau mengatakan:

*“ Kita memberikan pinjaman kembali kepada pemanfaat yang mengajukan permohonan proposal dana usaha dengan catatan tidak permasalahan pada peminjaman sebelumnya”* (Wawancara Selasa 18 Desember 2012 Pukul 11.25)

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa jika pemanfaat telah melunasi pinjamannya dapat mengajukan pinjaman kembali, ketika pinjaman yang lalu tidak ada permasalahan artinya ada satu prioritas yang dapat diberikan kepada calon pemanfaat yang telah melakukan pinjaman sebelumnya, karena kepercayaan dan kejujuran sudah terbukti sehingga permasalahan yang tidak diinginkan seperti penunggakan, penyalahgunaan dana usaha simpan pinjam dan lain-lain, kemungkinannya kecil. Bila dibandingkan calon pemanfaat yang belum pernah melakukan pinjaman dana usaha tersebut kepada BUMDes Rempak Maju Jaya.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai mekanisme pencairan dan pengembalian dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.17**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Mekanisme Pencairan dan Pengembalian**

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban								N	%
		S		CS		KS		TS			
		F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Mengenai apakah proposal dari pemanfaat yang masuk dicatat dalam buku antrian dan diverifikasi oleh direksi menurut urutan	13	18.57	24	34.28	29	41.43	4	5,71	70	100

2	Mengenai Apakah sudah Sesuai Apabila Pengembalian Pinjaman yang Lewat Jatuh Tempo dikenakan Denda Sesuai Ketentuan	28	40	23	32,86	18	25,71	1	1,43	70	100
3	Mengenai Pemanfaat yang Melunasi Pinjaman dan Dapat Mengajukan Pinjaman Berikutnya Sudah Terlaksana dengan Baik	22	31,43	34	48,57	11	15,71	3	4,29	70	100
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>30</b>	<b>81</b>	<b>38,57</b>	<b>58</b>	<b>27,62</b>	<b>8</b>	<b>3,81</b>	<b>210</b>	<b>100</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Keterangan tabel :

S : Sesuai

CS : Cukup Sesuai

KS : Kurang Sesuai

TS : Tidak Sesuai

Dari tabel rekapitulasi jawaban responden di atas mengenai Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes di Desa Rempak dengan menggunakan variabel mekanisme pencairan dan pengembalian, mayoritas responden menyatakan Cukup Sesuai yaitu sebanyak 81 orang atau 38.57% responden selanjutnya diikuti responden yang memberikan jawaban Sesuai sebanyak 63 orang atau 30% responden dan responden yang menjawab Kurang Sesuai yaitu sebanyak 58 orang atau 27.62% responden sedangkan responden yang memberikan paling sedikit yaitu Tidak Sesuai sebanyak 8 orang atau 3.81% dari keseluruhan responden. Berdasarkan data penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pelaksanaan ketentuan dan prosedur peminjaman pada BUMDes Rempak Maju Jaya Cukup sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes tersebut artinya belum sepenuhnya responden mengatakan sesuai.

### 5.2.3 Agunan dan Suku Bunga

Agunan adalah suatu barang/surat berharga yang dijadikan sebagai jaminan sebagai syarat untuk meminjam dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya. Hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang terdapat pada Pasal 9 menyatakan yaitu sebagai berikut:

1. Agunan harus asli dan keabsahannya tidak diragukan;
2. Penetapan nilai agunan ditentukan oleh Direksi;
3. Agunan dalam bentuk barang bergerak dapat diterima berupa kendaraan roda empat yang mempunyai nilai ekonomis dengan menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
4. Nilai agunan barang bergerak dihitung padaakhir jatuh tempo;
5. Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang bergerak maksimal sebesar 50% dari nilai agunan yang dihitung pada akhir peminjaman (jatuh tempo);
6. Besarnya nilai pinjaman dengan agunan barang tidak bergerak maksimal sebesar 60% dari nilai agunan saat meminjam;
7. Peminjaman barang agunan harus dinyatakan secara tertulis dan diketahui direktur dan komisisaris;
8. Keamanan agunan menjadi tanggungjawab Direksi;
9. Direksi wajib membuat daftar inventaris agunan secara sistematis;
10. Letak agunan boleh di desa atau laur desa (Bank);
11. Pinjaman kurang dari 1 tahun menggunakan agunan BPKB motor.

Agunan-agunan yang disebut di atas dapat dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya sesuai dengan besarnya pinjaman. Sedangkan suku bunga merupakan bunga pinjaman yang harus ditanggung oleh peminjam. Penetapan besarnya suku bunga ditetapkan dari hasil musyawarah Desa pertanggungjawaban tahunan oleh perangkat Desa dan pengurus BUMDes dan hal terdapat pada Pasal 13 AD/ART menyebutkan sebagai berikut:

1. Suku bunga peminjaman BUMDes disepakati dalam musyawarah Desa pertanggungjawaban tahunan sebesar 18%/tahun atau 1,5%/bulan;

2. Suku bunga dan lama waktu peminjaman bagi pemanfaat yang meminjam lebih dari Rp. 25 juta ditentukan melalui Berita Acara.

Selanjutnya untuk mengetahui Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh dengan menggunakan variabel agunan dan suku bunga yaitu sebagai berikut:

- a. **Agunan harus asli dan tidak diragukan keabsahannya serta agunan tersebut dinilai dan ditetapkan oleh Direksi.**

Agunan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota pemanfaat dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya, dan agunan yang dijadikan sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman adalah agunan yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai harganya) serta keasliannya dapat dijamin atau tidak diragukan. Kemudian agunan dinilai oleh Direksi mengenai besarnya jumlah harga agunan dengan disesuaikan besarnya pinjaman yang diajukan dan kemudian dasar hasil penilaian tersebut dapat ditetapkan atau diputuskan oleh Direksi. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai permasalahan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.18**  
**Jawaban Responden Mengenai Pemanfaat yang Meminjam yang Tidak Memberikan Agunan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Pernah	40	58,57 %
2	Kadang-Kadang	22	24, 29 %
3	Sering	8	17,14 %
4	Selalu		
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan 2012*

Dari tabel hasil penelitian di atas responden menjawab Tidak Pernah yaitu sebanyak 40 orang atau 58,57% responden diikuti dengan responden yang menjawab Kadang-Kadang sebanyak 22 orang atau 24,29% Responden dan selanjutnya jawaban responden menjawab Sering yaitu 8 orang atau 17,14% dari keseluruhan responden penelitian. Berdasarkan data hasil penelitian di atas dinyatakan bahwa mayoritas responden mengatakan Tidak ada pemanfaat yang meminjam tidak memiliki agunan. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi penulis mendapatkan penuturan masyarakat Desa Rempak bahwa ada pemanfaat yang tidak memiliki agunan karna pemanfaat tersebut dari keluarga Kepala Desa. Selanjutnya untuk mengetahui pemanfaat yang memberikan agunan tidak sah akan tetapi diterima oleh pengurus BUMDes dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.19**  
**Jawaban Responden Mengenai Syarat Agunan Memberatkan**  
**Masyarakat/Bagi Calon Pemanfaat**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Memberatkan		
2	Kurang Memberatkan	8	11,43 %
3	Cukup Memberatkan	15	21,43 %
4	Memberatkan	47	67,14 %
Jumlah		<b>70</b>	<b>100 %</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Memberatkan sebanyak 47 orang atau 67,14% diikuti dengan responden yang menjawab Cukup Memberatkan sebanyak 15 orang atau 21,43% Responden dan selanjutnya jawaban responden menjawab Kurang Memberatkan yaitu 8 orang atau 11,43% responden dari jumlah keseluruhan



responden. Dari data penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat agunan untuk meminjam dana usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya Memberatkan masyarakat/calon peminjam tersebut. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Rempak dengan (Bapak Sholichin tukang sayur jual sayur) beliau mengatakan:

*“ Bapak juga sebenarnya pengen betul minjam dana untuk menambah modal jualan saya tapi itulah kami ini orang tak punya, tak ada harta untuk dijadikan agunan”* (Wawancara Selasa 18 Desember 2012 Pukul 14:00).

Hasil wawancara di atas cukup menjadi dasar bahwa agunan yang diterapkan pada BUMDes Desa Rempak memberatkan masyarakat miskin. Sedangkan salah tujuan berdirinya BUMDes tersebut untuk mensejahterahkan masyarakat khususnya masyarakat miskin akan tetapi kenyataannya berbeda, seharusnya pengurus BUMDes Rempak Maju Jaya membuat kebijakan yang dapat mengakomodir masyarakat miskin yang tidak memiliki agunan. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai agunan palsu yang diberikan oleh pemanfaat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.20**  
**Jawaban Responden Mengenai pernah ada pemanfat yang Memberikan Agunan Tidak Sah/Palsu dan Diterima Oleh Direksi Sebagai Jaminan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Pernah	44	62,86 %
2	Kadang-Kadang	19	27,14 %
3	Sering	7	10 %
4	Selalu		
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Tidak Pernah sebanyak 44 orang atau 62,86% diikuti dengan responden yang menjawab Kadang-Kadang sebanyak 19 orang atau 27,14% Responden dan selanjutnya jawaban responden menjawab Sering yaitu 7 orang atau 10% responden dari jumlah keseluruhan responden. Dari data penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak pernah pengurus BUMDes menerima agunan palsu, hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris BUMDes dengan (Bapak Suwandi) beliau mengatakan:

*“ Kita tidak mungkin menerima agunan palsu, kalau kita menerima nanti berarti kita bekerjasama melakukan penipuan dan kita tidak mau BUMDes ini rugi”* (Wawancara Selasa 18 Desember 2012 Pukul 14:30 Wib)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan komitmen dan rasa tanggungjawab pengurus BUMDes dalam melaksanakan tugasnya sehingga agunan tidak sah tidak akan diterima karena jika ada permasalahan dari pihak pemanfaat yang nantinya tidak mengembalikan dana pinjamannya tersebut maka yang bertanggung jawab pengurus BUMDes tersebut, karena telah melakukan kerjasama dengan pihak pemanfaat.

**b. Keamanan agunan menjadi tanggung jawab Direksi dengan membuat daftar inventaris**

Agunan dari pemanfaat usaha simpan pinjam pada BUMDes merupakan jaminan yang diberikan pemanfaat kepada pengurus BUMDes selama jangka peminjaman berlangsung artinya jaminan keamanan agunan tersebut menjadi tanggungjawab pengurus BUMDes untuk menjaga agar tetap utuh/tidak hilang dengan cara membuat inventaris secara sistematis dan

agunan tersebut dapat disimpan di Kantor Desa dan juga boleh disimpan di Bank sesuai aturan yang ada. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai permasalahan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.21**  
**Jawaban Responden Mengenai Direksi Sudah Menjalankan Tugasnya**  
**Membuat Inventaris Untuk Keamanan Agunan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	15	21,43 %
2	Cukup Baik	19	27,14 %
3	Kurang Baik	23	32,86 %
4	Tidak Baik	13	18,57 %
Jumlah		<b>70</b>	<b>100 %</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Kurang Baik sebanyak 23 orang atau 32,86% responden diikuti dengan responden yang menjawab Cukup Baik sebanyak 19 orang atau 27,14% Responden dan jawaban responden menjawab Baik yaitu 15 orang atau 21,43% sedangkan responden menjawab paling sedikit yaitu responden yang menjawab tidak baik sebesar 13 orang atau 18,57% dari keseluruhan responden.

**c. Suku bunga BUMDes disepakati dalam musyawarah Desa sebesar 18%/tahun atau 1,5%/bulan**

Penetapan suku bunga BUMDes dilakukan setiap pertanggungjawaban tahunan dengan cara dilakukan musyawarah oleh perangkat Desa dengan

pengurus BUMDes artinya dalam penetapannya tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil kesepakatan, bisa jadi kesepakatan yang dihasilkan dapat meningkat pada tahun sebelumnya dan bisa jadi suku bunga yang ditetapkan menurun dari tahun sebelumnya. Tujuan bunga yang diterapkan untuk mendapatkan keuntungan dari proses peminjaman yang dilakukan dan nantinya hasilnya digunakan untuk membiayai gaji pengurus BUMDes, perlengkapan BUMDes dan untuk menambah pendapatan asli desa serta untuk menambah modal BUMDes itu sendiri. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai suku bunga yang diterapkan BUMDes Rampak Maju Jaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.22**  
**Jawaban Responden Mengenai Suku Bunga yang Ditetapan Oleh**  
**BUMDes sebesar 18%/Tahun atau 1,5%/Bulan tidak Memberatkan**  
**Masyarakat**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Memberatkan		
2	Kurang Memberatkan	4	5,71%
3	Cukup Memberatkan	21	30%
4	Memberatkan	45	64,29%
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Memberatkan yaitu sebanyak 45 orang atau 64,29% responden diikuti dengan responden yang menjawab Cukup Memberatkan sebanyak 21 orang atau 30% Responden dan jawaban responden menjawab Kurang Memberatkan yaitu 4 orang atau 5,71% dari keseluruhan responden. Berdasarkan data penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa suku bunga yang ditetapkan pada BUMDes

Rempak Maju Jaya Memberatkan masyarakat /pemanfaat. Hal demikian sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan pemanfaat dengan (Bapak Amien) beliau mengatakan:

*“Ia, suku bunga yang ditetapkan BUMDes Rempak Maju jaya sangat memberatkan kita karena bunganya sangat tinggi yaitu 1,5 per/bulan. Kalau bisa diturunkanlah sebab kalau seperti ini sama kita minjam sama rentenir”* (Wawancara Kamis Pukul 16:20 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa masyarakat sangat diberatkan dengan besarnya suku bunga yang diterapkan pada BUMDes Rempak Maju Jaya artinya dengan kebijakan penerapan suku bunga yang tinggi ini diharapkan dapat dilakukan evaluasi karena salah satu tujuan didirikan BUMDes ini adalah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan modal dana usaha akan tetapi suku bunga yang diterapkan memberatkan masyarakat maka tujuan dari BUMDes itu sendiri tidak tercapai.

**d. Suku bunga dan lama waktu peminjaman yang lebih dari 25 juta ditentukan melalui berita acara**

Segala aturan mengenai proses peminjaman sampai dengan pengembalian diatur dalam Anggara Rumah Tangga (ART) yang merupakan pedoman pelaksanaan usaha ekonomi desa pada BUMDes Rempak Maju Jaya di Desa Rempak. Untuk mengenai suku bunga dan lama peminjaman yang lebih dari 25 juta diatur dengan menggunakan berita acara peminjaman artinya mekanisme/aturan peminjaman yang jumlahnya 25 juta ke atas berbedah aturannya dengan yang melakukan peminjaman dengan angka di bawah 25 juta. Karena angka tersebut cukup besar sehingga untuk

menghindari segala hal-hal yang tidak diinginkan dibuatkan surat berita acara peminjaman. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.23**  
**Jawaban Responden Mengenai Suku bunga dan lama waktu peminjaman yang lebih dari 25 juta ditentukan melalui berita acara**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	28	40 %
2	Cukup Baik	26	37,14 %
3	Kurang Baik	13	18,57 %
4	Tidak Baik	3	4,29 %
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Baik yaitu sebanyak 28 orang atau 40% responden diikuti dengan responden yang menjawab Cukup Baik sebanyak 26 orang atau 37,14% Responden dan jawaban responden menjawab Kurang Baik yaitu 13 orang atau 18,57% sedangkan responden yang memberikan jawaban paling sedikit yaitu responden yang menjawab Tidak Baik sebesar 3 orang atau 4,29% dari keseluruhan responden. Berdasarkan data hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi pemanfaat yang meminjam dana 25 juta ke atas telah dibuatkan berita acara peminjaman hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris BUMDes Rempak Maju Jaya dengan (Bapak Suwandi) beliau mengatakan:

*“kalau masalah pemanfaat yang melakukan peminjaman 25 ke atas kita membuatkan berita acara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, karna kalau pemanfaat ini bermasalah kan masyarakat juga*

*yang dirugikan karna modal BUMDes macet sehingga daftar tunggu selanjutnya tidak dapat digulirkan” (Wawancara Selasa 18 Desember Pukul 14:37 Wib)*

Dari hasil wawancara penulis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan di atas telah dijalankan dengan baik dan yang menjadi catatan bahwa berita acara peminjaman dibuat untuk meminimalisir terjadinya kredit macet yang merugikan BUMDes dan daftar tunggu berikutnya. Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai agunan dan suku bunga yang diterapkan Pada BUMDes Rempak Maju Jaya di Desa Rempak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.24**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Agunan dan Suku Bunga**

No		Alternatif Jawaban								N	%
		S		CS		KS		TS			
		F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Mengenai pemanfaat yang meminjam yang tidak memiliki agunan	40	58.29	22	24.29	8	17.14			70	100
2	Mengenai syarat agunan memberatkan masyarakat/bagi calon peminjam			8	11.43	15	21.43	47	67.14	70	100
3	Mengenai pernah ada pemanfat yang memberikan agunan tidak sah/palsu dan ditrimah oleh direksi sebagai jaminan	44	61.86	19	27.14	7	10			70	100
4	Mengenai direksi sudah menjalankan tugasnya membuat inventaris untuk keamanan agunan	15	21,43	19	27,14	23	32,86	13	18,57	70	100
5	Mengenai suku bunga yang ditetapkan oleh bumdes sebesar 18%/tahun atau 1,5%/bulan tidak memberatkan masyarakat			4	5.71	21	30	45	64.29	70	100

6	Mengenai suku bunga dan lama waktu peminjaman yang lebih dari 25 juta ditentukan melalui berita acara	28	40	26	37.14	13	18.57	3	4,29	70	100
<b>Jumlah</b>		<b>127</b>	<b>30.24</b>	<b>98</b>	<b>23.33</b>	<b>87</b>	<b>20.71</b>	<b>108</b>	<b>25.71</b>	<b>420</b>	<b>100</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Keterangan tabel :

S : Sesuai

CS : Cukup Sesuai

KS : Kurang Sesuai

TS : Tidak Sesuai

Dari tabel rekapitulasi jawaban responden di atas mengenai Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes di Desa Rempak dengan menggunakan variabel mekanisme agunan dan suku bunga, mayoritas responden menyatakan Sesuai yaitu sebanyak 127 orang atau 30,24% responden selanjutnya diikuti responden yang memberikan jawaban Tidak Sesuai sebanyak 108 orang atau 25,71% responden dan responden yang menjawab Cukup Sesuai yaitu sebanyak 98 orang atau 23.33 % responden sedangkan responden yang memberikan jawaban Kurang Sesuai sebanyak 87 orang atau 20.71% dari keseluruhan responden. Berdasarkan data penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi penerapan agunan dan suku bunga pada BUMDes Rempak Maju Jaya Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes tersebut.

#### 5.2.4 Sanksi-Sanksi

Sanksi merupakan hukuman yang diterapkan jika melanggar aturan yang telah ditetapkan artinya sanksi ini ada karena adanya peyalagunaan/pelanggaran terhadap aturan atau perjanjian tertentu. Dalam hal



ini BUMDes Rempak Maju Jaya juga mengatur hal tersebut. Sebagaimana terdapat pada Pasal 12 AD/ART menyebutkan sebagai berikut:

1. Semua anggota dan pengurus BUMDes dapat menerima sanksi yang dibuat dalam musyawarah desa atau musyawarah khusus:
  - a. Bagi anggota yang tidak mengikuti rapat (minimal rapat tahunan) tidak akan diberikan pinjaman, sisa usaha, bonus dan hadiah, santunan atau lainnya dalam bentuk apapun;
  - b. Bagi anggota yang menyalahi ketentuan AD/ART dan peraturan khusus akan dikeluarkan dari keanggotaan;
2. Sanksi khusus bagi pemanfaat:
  - f. Bagi pemanfaat yang menunggak dikenakan denda sesuai aturan yang Direksi;
  - g. Pemanfaat yang menunggak diberikan teguran, apabila sampai 3 bulan menunggak pada bulan ke 4, akan dipanggil oleh Kepala Desa;
  - h. Apabila pemanggilan tidak mendapat tanggapan agunan akan dilelang;
  - i. Seluruh biaya yang timbul akibat proses penarikan atau pelelangan ditanggung oleh pemanfaat;
  - j. Bagi pemanfaat yang terbukti memberikan pernyataan tidak benar akan dilaporkan kepada pihak berwajib dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Sanksi bagi pengurus:
  - a. Bagi pengurus yang dengan sengaja membocorkan rahasia BUMDes kepada pihak yang tidak berkepentingan akan diberhentikan dari jabatannya;
  - b. Bagi pengurus yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengurus dan menyalahgunakan penggunaan keuangan akan diberhentikan dari jabatannya dan diproses melalui hukum yang berlaku.
4. Sanksi dapat berupa:
  - a. Teguran/peringatan
  - b. Pelanggaran/sanksi diumumkan di papan pengumuman;
  - c. Pemberhentian dengan tidak hormat;
  - d. Sanksi hukum melalui pengadilan.

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terdapat dalam Pasal-pasal yang berisikan dengan ancaman/sanksi-sanksi yang akan diterapkan bila terjadi pelanggaran kekuasaan atau aturan dalam peraturan/kebijakan tersebut. Begitu juga dengan kebijakan peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD beserta

jajarannya mengenai BUMDes Rempak Maju Jaya di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) diatur tentang sangsi sebagaimana dijelaskan diatas, hal ini diharapkan dengan adanya sangsi yang diberlakukan untuk meminimalisir penyelewengan-penyelewengan/pelanggaran-pelanggaran terhadap kebijakan/aturan yang buat tersebut dapat berjalan dengan seharusnya. Untuk mengetahui permasalahan mengenai implementasi sangsi-sangsi yang diterapkan pada BUMDes Rempak Maju Jaya, dapat dilihat pada sub indikator-indikator yang dijadikan tolak ukur pada penelitian ini.

#### **a. Sangsi diberikan kepada anggota dan pengurus BUMDes**

Sangsi diberikan kepada anggota dan pengurus BUMDes Rempak Maju Jaya artinya bagi anggota dan pengurus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AD/ART BUMDes Rempak Maju Jaya akan dikenakan sangsi sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini sangsi ditujukan kepada kedua belah pihak yaitu pihak anggota/pemanfaat dan pihak pengurus, adapun bentuk-bentuk pelanggarannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi anggota yang tidak mengikuti rapat (minimal rapat tahunan) tidak akan diberikan pinjaman, sisa usaha, bonus dan hadiah, santunan atau lainnya dalam bentuk apapun;
2. Bagi anggota yang menyalahi ketentuan AD/ART dan peraturan khusus akan dikeluarkan dari keanggotaan;

Adapun sangsi-sangsi yang diberikan dapat berupa pemberian surat teguran, di informasikan di papan pengumuman, pemberhentian dengan tidak hormat dan dapat berupa sangsi hukum melalui pengadilan. Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai permasalahan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.25**

**Jawaban Responden Mengenai Diberikan Sanksi Kepada Anggota dan Pengurus BUMDes yang tidak Pernah Mengikuti Rapat (Minimal Rapat Tahunan)**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	7	10 %
2	Sering	15	21,43 %
3	Kadang-Kadang	17	24,28 %
4	Tidak Pernah	31	44,29%
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Tidak Pernah yaitu sebanyak 31 orang atau 44,29% responden diikuti dengan responden yang menjawab Kadang-Kadang sebanyak 17 orang atau 24,28% Responden dan jawaban responden menjawab Sering yaitu 15 orang atau 21,43% sedangkan responden yang memberikan jawaban paling sedikit yaitu responden yang menjawab Tidak Baik sebesar 7 orang atau 10% dari keseluruhan responden. Dari data penelitian di atas menyatakan bahwa pemberian sanksi yang diberikan kepada anggota dan pengurus tidak pernah diberikan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pernahkah anggota dan pengurus BUMDes yang menyalahi ketentuan

AD/ART serta peraturan khusus dikeluarkan dari keanggotaan dan kepengurusan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.26**  
**Jawaban Responden Mengenai Pernahkah Anggota Dan Pengurus BUMDes yang Menyalahi Ketentuan AD/ART Serta Peraturan Khusus Dikeluarkan dari Keanggotaan dan Kepengurusan**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	6	8,57 %
2	Sering	16	22,86 %
3	Kadang-Kadang	20	28,57 %
4	Tidak Pernah	28	40%
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Tidak Pernah yaitu sebanyak 28 orang atau 40% responden diikuti dengan responden yang menjawab Kadang-Kadang sebanyak 20 orang atau 28,57% Responden dan jawaban responden menjawab Sering yaitu 16 orang atau 22,86% sedangkan responden yang memberikan jawaban paling sedikit yaitu responden yang menjawab Tidak Baik sebesar 6 orang atau 8,57% dari keseluruhan responden. Dari data penelitian di atas dapat kita simpulkan bahwa anggota dan pengurus BUMDes yang menyalahi ketentuan AD/ART serta peraturan khusus tidak dikenakan sanksi atau dikeluarkan menjadi keanggotaan dan kepengurusan BUMDes. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan ketua BUMDes (Bapak Azrol) beliau mengatakan:

*“ Adapun mengenai anggota dan pengurus yang tidak ikut rapat kita tidak langsung dikeluarkan dari keanggotaan karna kita tidak sampai hati dan selalu berikan kesempatan kedua” (Wawancara Senin 17 Desember 2012 Pukul 09:33 Wib).*

Hasil wawancara ketua BUMDes di atas menyatakan bahwa bagi anggota dan pengurus BUMDes yang menyalahi ketentuan-ketentuan yang relatif kecil tidak dikenakan sanksi dengan alasan kekeluargaan dan disfensi. Akan tetapi menurut penulis bahwa hal-hal demikian tidak seharusnya selalu diberikan karena dari masalah-masalah yang kecil itu akan menjadi besar dan memberikan pandangan yang kurang baik kepada anggota-anggota dan pengurus-pengurus lainnya yang ditakutkan akan meniru hal-hal buruk tersebut karena tidak memberikan sanksi.

#### **b. Sanksi khusus bagi pemanfaat BUMDes**

Didalam Anggaran Rumah Tangga (ART) diatur mengenai sanksi yang akan diterapkan khusus bagi pemanfaat usaha simpan pinjam pada BUMDes Rempak Maju Jaya yaitu bagi pemanfaat yang menunggak dan bagi pemanfaat yang memberikan pernyataan tidak benar seperti mengatakan bahwa pengurus BUMDes melakukan korupsi, atau menyalagunakan uang BUMDes dengan tanpa alat bukti yang kuat dan lain-lain. Untuk mengetahui permasalahan tersebut berikut disajikan tanggapan responden pada tabel berikut ini:

**Tabel V.27**  
**Jawaban Responden Mengenai Denda yang Dikenakan Pihak Pemanfaat**  
**Karna tidak Membayar Tepat Waktu Sudah Sesuai dengan Aturan yang**  
**Berlaku**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	29	42,43 %
2	Cukup Sesuai	33	47,14 %
3	Kurang Sesuai	8	11,43 %
4	Tidak Sesuai	-	-
Jumlah		<b>70</b>	<b>100 %</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Dari tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Sesuai yaitu sebanyak 30 orang atau 42,43% responden diikuti dengan responden yang menjawab Cukup Sesuai sebanyak 33 orang atau 47,14% Responden dan jawaban responden menjawab Kurang Sesuai yaitu 8 orang atau 11,43% dari keseluruhan responden. Berdasarkan hasil data angket penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa denda yang diberikan kepada pemanfaat yang menunggak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Bendahara BUMDes (Anita) beliau mengatakan:

*“kita memberikan denda setiap pemanfaat yang melakukan penunggakan, dihitung perhari, adapun besarnya Rp. 5000,- perharinya”* (Wawancara Penulis senin 17 Desember 2012 Pukul 11;10 Wib)

Wawancara di atas memperjelas bahwasanya pengenaan denda kepada pemanfaat telah dijalankan dengan baik dengan jumlah denda dihitung

perharinya yaitu Rp. 5000. Denda ini ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah pengurus BUMDes. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengurus dalam memberikan teguran dan pevelangan agunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.28**  
**Jawaban Responden Mengenai Pengurus BUMDes Memberikan Surat Teguran/Pemanggilan dan Melakukan Pevelangan Agunan Kepada Pemanfaat yang Menunggak sampai Bulan Ke 4**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	32	45,71 %
2	Sering	23	32,86 %
3	Kadang-Kadang	13	18,57 %
4	Tidak Pernah	2	2,86%
Jumlah		70	100 %

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kebijakan pengurus BUMDes yang memberikan surat teguran/pemanggilan serta melakukan pevelangan agunan bagi pemanfaat yang menunggak sampai bulan ke 4, responden memberikan jawaban sering 32 orang atau 45,71% responden selanjutnya diikuti responden yang memberikan jawaban Sering 23 orang atau 32,86 % responden dan responden yang memberikan jawaban Kadang-Kadang sebanyak 13 orang atau 18,57% responden sedangkan responden yang memberikan paling sedikit yaitu pilihan jawaban Tidak Pernah sebanyak 2 orang atau 2,86% dari keseluruhan responden penelitian. Artinya dalam pemberian surat teguran dan pevelangan agunan telah dijalankan Dengan baik. Akan tetapi 2 responden yang menyatakan tidak pernah, karena sepengetahuan mereka tidak pernah mendengar adanya pemanfaat yang diberikan surat teguran kepada pengurus BUMDes.

**c. Sanksi bagi pengurus**

Didalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Rempak Maju Jaya diatur tentang sanksi bagi pengurus yang melakukan pelanggaran/penyelewengan yaitu berupa:

- a. Bagi pengurus yang dengan sengaja membocorkan rahasia BUMDes kepada pihak yang tidak berkepentingan akan diberhentikan dari jabatannya, artinya pengurus BUMDes harus mampu menjaga segala hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan BUMDes tersebut dengan baik.
- b. Bagi pengurus yang dengan sengaja menyalagunakan kewenangannya sebagai pengurus dan menyalagunakan penggunaan keuangan akan diberhentikan dari jabatannya dan diproses melalui hukum yang berlaku.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden penelitian mengenai permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.29**  
**Jawaban Responden Mengenai Pengurus yang Menyalagunakan Kewenangan/Keuangan BUMDes diberikan Sanksi**

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	9	18.21 %
2	Cukup Baik	27	32.5 %
3	Kurang Baik	20	18.57 %
4	Tidak Baik	14	26.07 %
Jumlah		<b>70</b>	<b>100 %</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*



Dari tabel hasil penelitian di atas mayoritas responden menjawab Cukup Baik yaitu sebanyak 27 orang atau 32.5% responden diikuti dengan responden yang menjawab Kurang Baik sebanyak 20 orang atau 18.57% Responden dan jawaban responden menjawab Tidak Baik yaitu 14 orang atau 26.07% responden sedangkan responden yang memberikan jawaban paling sedikit yaitu Baik sebanyak 9 orang atau 18.21% dari keseluruhan responden. Berdasarkan hasil data angket penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian sanksi kepada pengurus yang menyalagunakan kewenangannya belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Rempak dengan (Pak Anton), beliau mengatakan:

*“Kamarin ada pengurus yang memakai dana untuk investasi, tapi sekarang tak tuu, dikeluarkan dari pengurus BUMDes dan sekarang masih jadi pengurus”* (Wawancara Jumat 21 Desember 2012 Pukul 16:23 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dapat disimpulkan bahwa pengurus yang menyalagunakan kewenangannya dengan menggunakan dana BUMDes tidak sesuai prosedur tidak dikenakan sanksi yang tegas yaitu dikeluarkan jadi pengurus dan diproses melalui jalur hukum. Dari hasil observasi untuk menggali permasalahan tersebut penulis mendapat data/informasi yang akurat bahwa pengurus yang menyalagunakan dan BUMDes tersebut masih dari keluarga Kepala Desa. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa pengurus BUMDes Rempak Maju Jaya yang melakukan penyelewengan tersebut tidak diberikan sanksi karena atas dasar

unsur keluarga/kekerabatan. Permasalahan ini harus ditanggapi dengan serius karena sanksi/hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dalam artian semua orang sama dimata hukum.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai sanksi-sanksi yang diterapkan pada BUMDes Rempak Maju Jaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.30**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Sanksi-Sanksi**

No	Pertanyaan-pertayaan dengan indikator Sanksi-Sanksi	Alternatif Jawaban								N	%
		S		CS		KS		TS			
		F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Mengenai pernahkah diberikan sanksi kepada anggota dan pengurus bumdes yang tidak pernah mengikuti rapat	7	10	15	21,43	17	24,26	31	44,29	70	100
2	Mengenai pernahkah anggota dan pengurus bumdes yang menyalahi ketentuan ad/art serta peraturan khusus dikeluarkan dari keanggotaan dan kepengurusan	6	8,57	16	22,86	20	28,57	28	40	70	100
3	Mengenai denda yang dikenakan pihak pemanfaat karna tidak membayar tepat waktu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku	29	41,43	33	47,14	8	11,43			70	100
4	Mengenai pengurus bumdes memberikan surat teguran/pemanggilan dan melakukan pelelangan agunan kepada pemanfaat yang menunggak sampai bulan ke 4	32	45.71	23	32.86	13	18.57	2	2.86	70	100
5	Mengenai pengurus yang menyalagunakan kewenangan/keuangan bumdes diberikan sanksi	9	12.86	27	38.57	20	28.57	14	20	70	100
Jumlah		83	23.71	114	32.29	78	22.29	75	21,43	350	100

Sumber: Data Olahan Penelitian 2012

Keterangan tabel:

S : Sesuai

CS : Cukup Sesuai

KS : Kurang Sesuai

TS : Tidak Sesuai

Dari tabel rekapitulasi jawaban responden di atas mengenai Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes di Desa Rempak dengan menggunakan variabel mekanisme Sanksi-sanksi, mayoritas responden menyatakan Cukup Sesuai yaitu sebanyak 114 orang atau 32,29% responden selanjutnya diikuti responden yang memberikan jawaban Sesuai sebanyak 83 orang atau 23,71% responden dan responden yang menjawab Kurang Sesuai yaitu sebanyak 78 orang atau 22,29 % responden sedangkan responden yang memberikan jawaban Tidak Sesuai sebanyak 75 orang atau 21,43% dari keseluruhan responden. Berdasarkan data penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Sanksi-sanksi baik pengurus, anggota dan pemanfaat pada BUMDes Rempak Maju Jaya masih dalam kategori Cukup sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi penelitian Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.31**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak**

NO	Sub Indikator	S		CS		KS		TS		N	%
		F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Ketentuan dan Prosedur Peminjaman	182	38,57	181	36,94	103	21,02	24	4,90	490	100
2	Mekanisme Pencairan dan Pengambilan Dana	63	30	81	38,57	58	27,62	8	3,81	210	100
3	Agunan dan Suku Bunga	127	30,24	98	23,33	87	20,71	108	25,71	420	100
4	Sanksi-Sanksi	83	23,71	114	32,29	78	22,29	75	21,43	350	100
<b>Jumlah</b>		<b>455</b>	<b>30,95</b>	<b>474</b>	<b>32,24</b>	<b>326</b>	<b>22,18</b>	<b>215</b>	<b>14,63</b>	<b>1470</b>	<b>100</b>

Sumber: *Data Olahan Penelitian 2012*

Keterangan tabel:

S : Sesuai

CS : Cukup Sesuai

KS : Kurang Sesuai

TS : Tidak Sesuai

Dari tabel rekapitulasi jawaban responden di atas mengenai Implementasi Usaha Ekonomi Desa Pada BUMDes di Desa Rempak mayoritas responden menyatakan Cukup Sesuai yaitu sebanyak 474 orang atau 32,24% responden selanjutnya diikuti responden yang memberikan jawaban Sesuai sebanyak 455 orang atau 30,95% responden dan responden yang menjawab Kurang Sesuai yaitu sebanyak 326 orang atau 22,18% responden sedangkan responden yang memberikan jawaban Tidak Sesuai sebanyak 215 orang atau 14,63% dari keseluruhan responden, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes di Desa Rempak masih dalam kategori Cukup Sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Rempak Maju Jaya. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi usaha simpan pinjam pada BUMDes di Desa Rempak yaitu, masih adanya pemanfaat yang menunggak, adanya pemanfaat yang berusia tidak sesuai dengan ketentuan (AD/ART), dan masih terdapat unsur nepotisme.

### **5.3 Faktor-faktor Penghambat Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh**

Adapun faktor-faktor penghambat implementasi usaha simpan pinjam pada BUMDes di Desa Rempak yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa salah satu yang menghambat implementasi usaha simpan pada BUMDes di Desa Rempak adalah faktor sumberdaya manusianya, yang masih tergolong rendah baik dari pihak pengelola apalagi dari pihak pemanfaat. Pendidikan pengelola BUMDes tersebut hanya tamatan SMA/Sederajat atau tidak yang sarjana artinya pendidikan pihak pengelola tersebut masih rendah sehingga berdampak kepada kinerjanya. Sedangkan pendidikan dari pihak pemanfaat juga masih tergolong rendah rata-rata tingkat pendidikannya hanya tamatan SMP/Sederajat, sehingga dengan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan data BUMDes tersebut belum dapat maksimal.
2. Faktor budaya, dalam implementasi usaha simpan pinjam pada BUMDes di Desa Rempak factor budaya juga menjadi penghambat dari implementasinya, karena masih ada unsur-unsur nepotisme yang diterapkan baik itu untuk perekrutan pengurus BUMDes maupun pemberian pinjaman terhadap pemanfaat dana usaha tersebut, adapun Unsur nepotisme ini dari pihak Kepala Desa beserta jajarannya.
3. Kurangnya konsistensi serta komitmen pengurus BUMDes dalam menjalankan aturan yang tertuang pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sehingga implementasi usaha simpan pinjam tidak berjalan sesuai dengan tujuannya.
4. Adanya persepsi masyarakat/pemanfaat bahwa jika menggunakan peralatan/dana (uang) Negara atau Pemerintah tidak kita kembalikan/lambat kita kembalikan tidak menjadi permasalahan yang sangat serius.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Desa sebagai mana yang diamanahkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan ditambah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Siak. Dari dasar tersebut Pemerintah Desa Rempak membentuk BUMDes, dengan nama Rempak Maju Jaya, bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Desa, memajukan perekonomian Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan pengelolaan aset-aset Desa. Dimana BUMDes tersebut diatas hanya masih mengelola usaha simpan pinjam. Adapun dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauhmana implementasi usaha simpan pinjam pada BUMDes tersebut, dengan menggunakan 4 (Empat) indikator yang penulis jadikan tolak ukur dalam penelitian ini yang berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) sehingga penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan dan prosedur peminjaman didapat rata-rata tanggapan responden yang menyatakan Sesuai 182 orang atau 38,78% responden selanjutnya yang menyatakan Cukup Sesuai sebanyak 181 orang atau 33,67 % responden dan yang menyatakan Kurang Sesuai 103 orang atau 21,84% responden sedangkan yang menyatakan Tidak Sesuai 24 orang atau 5,71% responden.
2. Mekanisme pencairan dan pengembalian dana BUMDes didapat rata-rata tanggapan responden yang menyatakan Sesuai 63 orang atau 32,38% responden selanjutnya yang menyatakan Cukup Sesuai sebanyak 81 orang atau 35,71 % responden dan yang menyatakan Kurang Sesuai 58 orang atau 27,65% responden sedangkan yang menyatakan Tidak Sesuai 8 orang atau 4,29% responden.
3. Agunan dan Suku Bunga didapat rata-rata tanggapan responden yang menyatakan Sesuai 127 orang atau 30,48% responden selanjutnya yang menyatakan Cukup Sesuai sebanyak 98 orang atau 22,14% responden dan yang menyatakan Kurang Sesuai 87 orang atau 21,67% responden sedangkan yang menyatakan Tidak Sesuai 108 orang atau 25,71% responden.
4. Sanksi-sanksi didapat rata-rata tanggapan responden yang menyatakan Sesuai 83 orang atau 23,71% responden selanjutnya yang menyatakan Cukup Sesuai sebanyak 114 orang atau 32,29% responden dan yang menyatakan Kurang Sesuai 78 orang atau 22,29%

responden sedangkan yang menyatakan Tidak Sesuai 75 orang atau 21,43% responden.

Jadi secara keseluruhan Usaha Simpan Pinjam dalam Ketentuan dan prosedur peminjaman, Mekanisme pencairan dan pengembalian dana, Agunan dan Suku Bunga, Sanksi-sanksi maka dapat disimpulkan Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak setelah direkapitulasi secara keseluruhan berada pada kategori **“Cukup Baik”** dengan tanggapan responden yang menyatakan Cukup Sesuai 474 orang atau 32,24%. Implementasi Usaha Simpan Pinjam sudah berjalan dengan cukup baik karena menjalankan usaha simpan pinjam berdasarkan pada ketentuan AD/ART BUMDes, tetapi ada beberapa cacatan yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Adanya agunan yang memberatkan masyarakat terutama pada masyarakat miskin yang tidak memiliki harta yang akan dijadikan agunan, didalam ketentuan AD/ART tidak ada aturan yang memberikan kompensasi bagi masyarakat untuk meminjam dana usaha simpan pinjam tanpa menggunakan agunan, sehingga dana usaha simpan tidak tersentuh pada masyarakat miskin padahal dana usaha simpan pinjam diterutamakan pada masyarakat miskin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Suku bunga yang ditetapkan oleh BUMDes terlalu memberatkan bagi masyarakat/pemanafaat karena tujuan dari pemberian dana usaha



simpan adalah membantu masyarakat dalam mendapatkan modal akan tetapi suku bunga yang diterapkan memberatkan masyarakat maka tujuan dari BUMDes itu sendiri tidak tercapai.

3. Sanksi yang diberikan kepada pemanfaat dan pengelola tidak pernah diberikan oleh BUMDes terhadap pelanggaran AD/ART sehingga Implementasi Usaha Simpan tidak terlaksana dengan baik.
4. Adanya pemanfaat yang berusia tidak sesuai dengan AD/ART yaitu usia minimal 20 atau yang sudah menikah, usia menentukan perilaku seseorang apabila usia 20 Tahun atau yang sudah menikah dapat diminta pertanggung jawabannya.

Adapun faktor penghambat Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu sebagai berikut:

5. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa salah satu yang menghambat implementasi usaha simpan pada BUMDes di Desa Rempak adalah faktor sumberdaya manusianya, yang masih tergolong rendah baik dari pihak pengelola apalagi dari pihak pemanfaat. Pendidikan pengelola BUMDes tersebut hanya tamatan SMA/Sederajat atau tidak yang sarjana artinya pendidikan pihak pengelola tersebut masih rendah sehingga berdampak kepada kinerjanya. Sedangkan pendidikan dari pihak pemanfaat juga masih tergolong rendah rata-rata tingkat pendidikannya hanya tamatan SMP/Sederajat, sehingga dengan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan data BUMDes tersebut belum dapat maksimal.

6. Faktor budaya, dalam implementasi usaha simpan pinjam pada BUMDes di Desa Rempak faktor budaya juga menjadi penghambat dari implementasinya, karena masih ada unsur-unsur nepotisme yang diterapkan baik itu untuk perekrutan pengurus BUMDes maupun pemberian pinjaman terhadap pemanfaat dana usaha tersebut, adapun Unsur nepotisme ini dari pihak Kepala Desa beserta jajarannya.
7. Kurangnya konsistensi serta komitmen pengurus BUMDes dalam menjalankan aturan yang tertuang pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sehingga implementasi usaha simpan pinjam tidak berjalan sesuai dengan tujuannya.
8. Adanya persepsi masyarakat/pemanfaat bahwa jika menggunakan peralatan/dana (uang) Negara atau Pemerintah tidak kita kembalikan/lambat kita kembalikan tidak menjadi permasalahan yang sangat serius.

## **6.2 Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih terhadap Implementasi Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh, kepada pihak terkait agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik antara lain:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, agar dapat menambah dana usaha simpan pinjam di Desa Rempak, agar penyaluran kepada

pemanfaat dapat bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu.

2. Kepada pengelola sebaiknya persyaratan dan ketentuan-ketentuan program ini ditinjau kembali karena antara tujuan dan persyaratan terkesan bertentangan dimana tujuan program adalah mengentaskan kemiskinan namun dalam persyaratan terkesan memberatkan masyarakat miskin
3. Kepada pemanfaat agar dapat memenuhi segala kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai anggota/peminjam dana usaha simpan pinjam seperti tidak melakukan penunggakan, mempergunakan dana usaha tersebut sesuai aturan yang telah ditentukan.
4. Agar pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Pada BUMDes Desa Rempak dapat berjalan dengan maksimal maka persyaratan dan ketentuan-ketentuan pinjaman yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa lebih disosialisasikan kepada masyarakat supaya jangan ada kesalahpahaman dalam masyarakat mengenai persyaratan dan ketentuan pinjaman.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, CV. Alfabeta
- Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rieneka Cipta
- Eko, Sutaro, 2004, *Reformasi Politik Dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2008, *Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah*, Lukman Offet, Yogyakarta
- LAN. 2005, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Mudiyono DKK. 2005, *Dimensi-Dimensi Masalah Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, APMD Press
- Nogroho D Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo
- Singarimbun Masri dan Effendi Sofian, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, anggota IKAPI.
- Soemantri, Trisantono, Soemantri, 2011, *Pemerintahan Desa*, Bandung, Fokusmedia
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, CV. Alfabeta
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian kuantitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta
- Subarsono AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung, PT. Rfika Aditama

Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, Citra utama

Sumidiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, PT Gramedia

Umar, Husein, 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Jakarta, PT Gramedia

Winarno Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Presindo

Wibawa. Samodra, 2011, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta Graha Ilmu

Wahab Abdul Solichin, 2004, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara

William, N,Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press

Zubaedi, 2007, *Wacana Pembangunan Alternatif*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta.

Zuriah. Nurul, 2009, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta, PT Bumi Aksara.

### **Referensi Lain**

*DIREKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI, 2011, Modul Bimbingan Teknis Tata Kelola Pengembangan Kapasitas LKM-B3K/BUMDes*

*BPPM Provinsi Riau, 2009, Petunjuk Teknis Program Peremberdayaan Desa (PPD)*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.*

*Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa Kabupaten siak*

*Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak*

## KUESIONER PENELITIAN

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Responden Yang Terhormat,

Melalui kesempatan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i agar dapat meluangkan waktu sedikit untuk mengisi daftar pertanyaan (kuesioner) penelitian ini dengan baik dan benar,

Tujuan pengisian daftar pertanyaan ini adalah sebagai bahan yang akan diolah lebih lanjut guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi saya adalah ***“Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak”***. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan sangat membantu saya dalam pelaksanaan penelitian ini, atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, diucapkan terimah kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Hormat Saya

**HAMIM MUNJAHIDI**

10975008207

**DAFTAR ANGKET PENELITIAN**  
**IMPLEMENTASI USAHA SIMPAN PINJAM PADA BUMDes DESA**  
**REMPAK KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK**

**1. Ketentuan Pengisian Angket**

Untuk keperluan penyusunan skripsi, penulis sangat mengharapkan kesediaan bapak/ibu untuk mengisi setiap pertanyaan yang diajukan dan jawaban tersebut adalah yang paling sesuai menurut bapak/ibu dengan ketentuan:

1. Kerahasiaan jawaban dan identitas akan tetap terjaga dan data ini semata-mata dipergunakan untuk penyusunan skripsi, jawaban diisi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.
2. Jawaban yang sesuai menurut Responden harap dilingkar atau diberi tanda silang (X)
3. Pilih hanya salah satu dari alternatif jawaban yang tersedia
4. Pengambilan data ini tidak bersifat pemaksaan atau tidak ada tekanan dari pihak manapun
5. Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih

**2. Identitas Peneliti**

- |                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1) Nama            | : <b>HamimMunjahidi</b>           |
| 2) Nim             | : 10975008207                     |
| 3) Jurusan<br>(SI) | : Administrasi Negara/Strata Satu |
| 4) Fakultas        | : Ekonomi dan Ilmu Sosial         |
| 5) Universitas     | : UIN Suska Riau                  |

**3. Identitas Responden**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1) Jenis kelamin       | : |
| 2) Umur                | : |
| 3) Suku                | : |
| 4) Pendidikan terakhir | : |
| 5) Pekerjaan/Usahanya  | : |

**Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel penelitian****1. Ketentuan dan Prosedur Peminjaman**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah sudah sesuai ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Direksi BUMDes dengan implementasinya?
  - a. Sesuai
  - b. Cukup Sesuai
  - c. Kurang Sesuai
  - d. Tidak Sesuai
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemberian pinjaman sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan skala prioritas masyarakat setempat?
  - a. Sesuai
  - b. Cukup Sesuai
  - c. Kurang Sesuai
  - d. Tidak Sesuai
3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Prosedur Pinjaman telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan BUMDes dengan mengutamakan warga Desa Rempak yang berdomisili minimal 3 tahun dengan dibuktikan KTP dan KK sudah sesuai ?
  - a. Sesuai
  - b. Cukup Sesuai
  - c. Kurang Sesuai
  - d. Tidak Sesuai
4. Menurut Bapak/Ibu, Apakah sudah sesuai ketika pemanfaat meminjam lebih dari 25 juta dengan perjanjian menggunakan berita acara ?
  - a. Sesuai
  - b. Cukup Sesuai
  - c. Kurang Sesuai
  - d. Tidak Sesuai
5. Menurut Bapak/Ibu apakah terdapat peminjam yang berumur dibawah 20 tahun atau belum menikah?



- a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-kadang
  - d. Tidak pernah
- 6. Menurut Bapak/Ibu, Apakah pemanfaat dalam mengusulkan pinjaman telah membuat proposal sudah sesuai dengan aturan dan dinilai oleh Direksi?
  - c. Sesuai
  - d. Cukup Sesuai
  - c. Kurang Sesuai
  - d. Tidak Sesuai
- 7. Menurut Bapak/Ibu, Apakah pemanfaat bersedia menerima sanksi serta menanggung biaya administrasi?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-kadang
  - d. Tidak pernah

## **2. Mekanisme Pencairan dan Pengambilan Dana**

- 1. Menurut Bapak/Ibu, apakah proposal dari pemanfaat yang masuk dicatat dalam buku antrian dan diverifikasi oleh direksi menurut urutan sesuai dengan pelaksanaannya?
  - a. Sesuai
  - b. Cukup Sesuai
  - c. Kurang Sesuai
  - d. Tidak Sesuai
- 2. Menurut Bapak/Ibu, apakah sudah sesuai apabila pengembalian pinjaman yang lewat jatuh tempo dikenakan denda sesuai dengan ketentuan?
  - a. Sesuai
  - b. Cukup Sesuai
  - c. Kurang Sesuai
  - d. Tidak Sesuai
- 3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah pemanfaat yang melunasi pinjaman dan dapat mengajukan pinjaman berikutnya sudah telaksana dengan baik?
  - a. Baik
  - b. Cukup Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik

## **3. Agunan dan Suku Bunga**

1. Menurut Sepengatahuan Bapak/Ibu, Apakah ada pemanfaat yang meminjam yang tidak memiliki agunan?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-kadang
  - d. Tidak pernah
2. Menurut Bapak/Ibu apakah syarat agunan memberatkan bagi calon masyarakat/peminjam?
  - a. Memberatkan
  - b. Cukup Memberatkan
  - c. Kurang Memberatkan
  - d. Tidak Memberatkan
3. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu apakah pernah ada pemanfaat yang memberikan agunan tidak sah/palsu dan diterima oleh direksi sebagai bahan jaminan peminjaman?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-Kadang
  - d. Tidak Pernah
4. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Direksi sudah menjalankan tugasnya dengan baik membuat daftar/penempatan inventaris untuk keamanan agunan?
  - a. Baik
  - b. Cukup baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah suku bunga yang ditetapkan oleh BUMDes Desa Rempak yaitu 18% /tahun atau 1.5%/bulan tidak memberatkan masyarakat/pemanfaat ?
  - a. Memberatkan
  - b. Cukup Memberatkan
  - c. Kurang Memberatkan
  - d. Tidak Memberatkan
6. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah ketentuan yang ditetapkan oleh BUMDes yaitu suku bunga dan lama waktu peminjaman bagi pemanfaat yang lebih dari 25 juta ditentukan melalui berita acara telah dijalankan dengan baik?
  - c. Baik
  - c. Kurang Baik

- d. Cukup Baik                      d. Tidak Baik

#### 4. Sanksi-sanksi

1. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu, pernahkah diberikan sanksi kepada anggota dan pengurus BUMDes yang tidak pernah mengikuti rapat (Minimal rapat tahunan) ?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-Kadang
  - d. Tidak Pernah
2. Menurut sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah pernah anggota dan pengurus BUMDes yang menyalahi ketentuan AD/ART dan peraturan Khusus dikeluarkan dari kenggotaan dan kepengurusan?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-Kadang
  - d. Tidak Pernah
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah denda yang dikenakan kepada pihak pemanfaat karna tidak membayar tepat waktu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?
  - a. Sesuai
  - b. Cukup Sesuai
  - c. Kurang Sesuai
  - d. Tidak Sesuai
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengurus BUMDes memberikan surat teguran/pemanggilan dan melakukan pelelangan agunan kepada Pemanfaat yang menunggak sampai bulan ke 4 ?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-Kadang
  - d. Tidak Pernah
5. Menurut Bapak/Ibu apakah pernah ada pengurus yang menyalagunakan kewenangannya serta melayagunakan keuangann BUMDes diberikan sanksi diberhentikan dari jabatannya dan diproses secara hukum secara baik?
  - a. Baik
  - b. Cukup Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak Baik

b. Cukup baik

d. Tidak baik

#### **DAFTAR WAWANCARA**

1. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola pemerintahan desa dan masyarakat, apakah pengelolaan tersebut sudah di jalankan dengan baik?
2. Bagaimanakah sistem pemberian pinjaman yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan apakah ada kendala yang dialami oleh petugas dalam proses pemberian pinjaman tersebut?
3. Bagaimanakah sistem penetapan suku bunga yang dilakukan oleh BUMDes dan apakah suku bunga tersebut tidak terlalu besar bagi pemanfaat sehingga memberatkan masyarakat?
4. Bagaimanakah cara BUMDes dalam mengatasi pemanfaat yang sering menunggak dan apakah sanksi yang diberikan terhadap pemanfaat yang menunggak?
5. Apakah ada pemanfaat yang meminjam 50 juta keatas? Bagaimana penerapan skema kredit yang meminjam 50 juta keatas?
6. Apakah ada pengurus BUMDes yang menyalahgunakan keuangan BUMDes dan apakah sanksi yang diberikan oleh direksi BUMDes?
7. Bagaimanakah sistem penilaian Agunan yang dilakukan oleh Direksi BUMDes dan apakah agunan sudah terjamin keamanannya?
8. Adakah sanksi yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada anggota yang tidak mengikuti rapat Tahunan?

9. Adakah pemanfaat yang meminjam dana bukan untuk usaha melainkan untuk kebutuhan yang lain?

### BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap **Hamim Munjahidi** Lahir di Bandar Sungai pada tanggal 28 Oktober 1989 anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Ayahanda Nasirun dan Ibunda Romlah. Pendidikan Formal penulis dimulai pada tahun 1996 yaitu diawali dengan Sekolah Dasar di SDN 006 Desa Bandar

Sungai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan Menamatkan pada Tahun 2003, kemudian penulis melanjutkan sekolah di MTS Hidayatul Muhtadiin Desa Bandar Sungai dan menamatkannya pada tahun 2006. Selanjutnya penulis melanjutkan sekolah di SMA Belading Kecamatan Sabak Auh dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2009. Keinginan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi tercapai setelah diterima sebagai mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2009. Pada bulan September 2012 penulis melakukan penelitian di Desa Rempak dengan judul “Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak”. Hasil penelitian tersebut kemudian diujikan dalam Sidang Munaqasyah (Oral Comprehensif) pada Tanggal 23 Januari 2013 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan Lulus dengan hasil **Sangat Memuaskan** dan berhak mendapat Gelar S. Ap.

